



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368

Faksimile 024-7613181 Laman : dpubinmarcipka.jatengprov.go.id

Surat Elektronik : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2018 - 2023



DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA



Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman <http://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si

NIP : 19661129 199203 1 005

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

Berdasar SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/148/2018 tanggal 1 Februari 2018
Bertugas untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

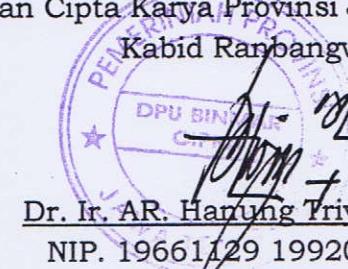
Berkedudukan di Jalan Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2019
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Kabid Ranbangwas



Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si
NIP. 19661129 199203 1 005

BAB I

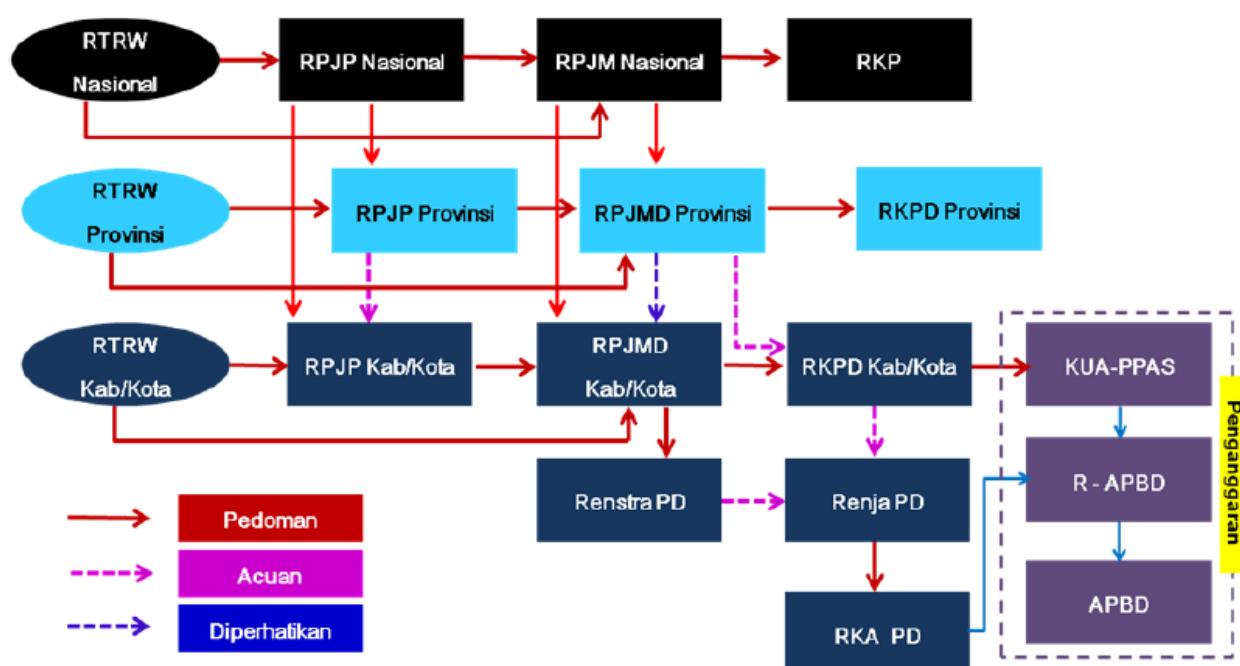
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 yang akan ditetapkan kemudian.

Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan – kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu strategis bedasarkan skala prioritas yang akan dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun.

Proses Penyusunan Renstra yaitu penyusunan Rancangan Awal Renstra, Desk Pencermatan Rancangan Awal Renstra, Sosialisasi sistem e-RPJMD dan e-Renstra, Input Rancangan Awal Renstra ke sistem, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Penyempurnaan Rancangan Renstra, Penyampaian Rancangan Renstra ke Bappeda, Verifikasi Rancangan Renstra, Penyempurnaan Rancangan Renstra, Perumusan Rancangan Akhir Renstra, Penyampaian Rancangan Akhir Renstra, Verifikasi Rancangan Akhir Renstra, Penyampaian kembali Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.



Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Keterkaitan renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dengan RPJMD antara lain : meningkatkan kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan kewenangan provinsi serta mendukung konektivitas hasil pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Mantingan, Semarang-

Demak, Bawen-Yogyakarta; meningkatkan pelayanan air bersih, sanitasi di perkotaan maupun perdesaan; meningkatkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi yang bersertifikat dan pelayanan informasi konstruksi guna meningkatkan daya saing serta pengembangan wilayah.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mewujudkan Renstra Tahun 2018 - 2023 secara bertahap, berkesinambungan melakukan berbagai program dan kegiatan untuk memelihara dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan di semua wilayah, meningkatkan pelayanan air bersih, sanitasi di perkotaan maupun perdesaan, meningkatkan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi, serta meningkatkan pengawasan dan pelayanan informasi konstruksi.

Total panjang jalan provinsi adalah 2.404,741 Km berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/2/2016, tanggal 25-01-2016 tentang penetapan status ruas - ruas jalan sebagai jalan provinsi dan peranannya dalam jaringan jalan kolektor 2 dan kolektor 3 di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan panjang jembatan provinsi 23.933,79m, termasuk menangani sebagian ruas jalan non status sepanjang 48,99 Km yaitu Jalan Komplek Wisata Borobudur, jalan Wawar – Tambakmulyo (JJLS) dan jalan alternatif Bandungsari - Salem.

Peningkatan kinerja jalan Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun dengan kondisi akhir tahun 2018 dengan total panjang jalan 2.404,741 Km adalah sebagai berikut; *Kondisi jalan baik sepanjang 2.154,648 Km(89,60%), Kondisi jalan sedang sepanjang 250,093 Km (10,40%), dan Kondisi jembatan baik sepanjang 20.535,192 m (85,80%), Kondisi jembatan sedang sepanjang 3.398,598 m (14,20%)*, maka sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab tersebut dituangkan dalam program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan dan Penggantian Jembatan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Kecipta Karyaan; Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dan Pembangunan Pengelolaan Bangunan serta Pengembangan Jasa Konstruksi. Disusunlah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023.

Peningkatan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan kondisi akhir Tahun 2018 adalah *Air Minum Perkotaan 79,50%, Air minum Perdesaan 72,50% dan Sanitasi 81,50%*. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi dengan *kondisi akhir Tahun 2018 adalah Sertifikasi Hasil Uji 2000 sertifikat, Informasi Konstruksi 17 kali dan jumlah pelaku jasa konstruksi 4230 orang*.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah:

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang – Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
6. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Menteri PAN dan RB PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pentunjuk Penyusunan IKU;
22. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025;
24. Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
25. Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025;
26. Perda Jateng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
27. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan;
28. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
29. Perda Jateng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Daerah RPJMD Perubahan Tahun 2013 – 2018;
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

- 1.3.1 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah disusun dengan maksud :
 - a. Sebagai dokumen induk perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
 - b. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan.
- 1.3.2 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam Resntra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH.

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian - capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; Telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Telaah Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD 2018-2023; dan Penentuan isu-isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, dan indikator kinerja sesuai dengan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2. Tugas Pokok :

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.1.3. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
- b. Pengoordinasian kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

2.1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Susunan Organisasi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - Subbagian Program;
 - Subbagian Keuangan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan, membawahkan :
 - Seksi Rancang Bangun;
 - Seksi Pengawasan Teknis;
 - Seksi Pengelolaan Aset Kebinamargaan dan Keciptakaryaan.
- d. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur, membawahkan :
 - Seksi Pelaksana Jalan Timur 1;
 - Seksi Pelaksana Jalan Timur 2;
 - Seksi Administrasi Teknis Timur.
- e. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat, membawahkan :
 - Seksi Pelaksana Jalan Barat 1;
 - Seksi Pelaksana Jalan Barat 2;
 - Seksi Administrasi Teknis Barat.
- f. Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung, membawahkan :
 - Seksi Pengembangan Air Minum;
 - Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan;
 - Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi.
- g. Balai Pengelolaan Jalan, membawahkan :
 - Subbagian Tata Usaha
 - Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 1
 - Seksi Jalandan Jembatan Wilayah 2

Merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- h. Balai Pengujian dan Peralatan, membawahkan :
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Seksi Pengujian Mutu;
 - Seksi Peralatan dan Alat Berat
 - Merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelaksanaan

pengujian dan pengelolaan peralatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

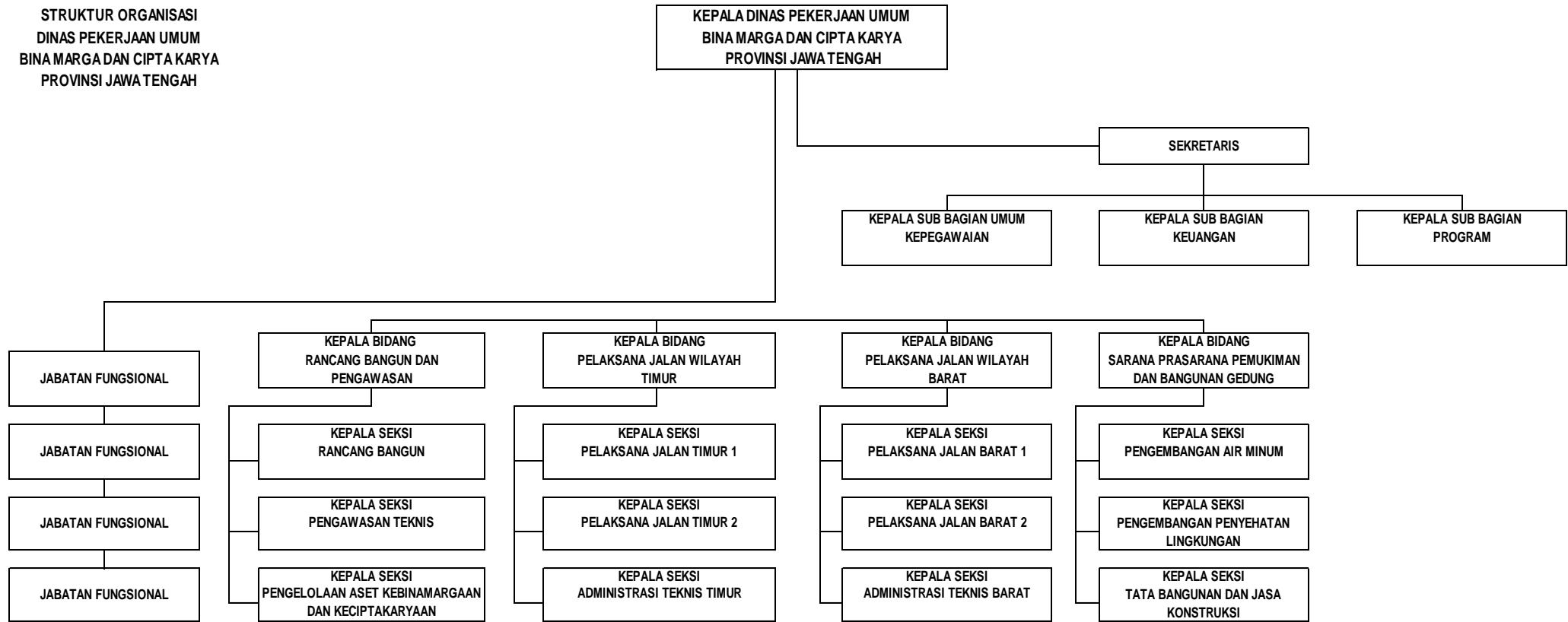
i. Balai Jasa Konstruksi, membawahkan :

- Subbagian Tata Usaha;

Merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

j. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Kartya Provinsi Jawa Tengah

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**Gambar 2.2.**

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Kartya Provinsi Jawa Tengah

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan Jalan, air minum, sanitasi, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah merupakan Dinas teknis, namun demikian apabila dilihat dari sumber daya manusia akan terlihat komposisi pegawai non teknis lebih banyak dibandingkan dengan pegawai teknis. Pada September 2018 jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebanyak 795 dengan data dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

2.1.5. Susunan Kepegawaian :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Status September 2018

JUMLAH PEGAWAI		
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (Kantor Pusat)	156 Orang
2.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	46 Orang
3.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	77 Orang
4.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	82 Orang
5.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	42 Orang
6.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	50 Orang
7.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	41 Orang
8.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	90 Orang
9.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	115 Orang
10.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	47 Orang
11.	Balai Pengujian dan Peralatan	23 Orang
12.	Balai Jasa Konstruksi	26 Orang
TOTAL		795 Orang

2.1.6. Rincian Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.2 Rincian Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Status September 2018

RINCIAN PEGAWAI		
I. Jenis Kelamin		
1.	Pria	677 Orang
2.	Wanita	118 Orang
II. Pendidikan		
1.	Doktor	1 Orang
2.	Pasca Sarjana (S-2)	74 Orang
3.	Sarjana (S-1)	188 Orang
4.	D3	55 Orang
5.	SLTA	335 Orang
6.	SLTP	86 Orang
7.	SD	57 Orang
III. ESELON		
1.	II	0 Orang
2.	III	12 Orang
3.	IV	44 Orang

2.1.7. Asset Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

a. Asset Peralatan Utama

**Tabel 2.3 Asset Peralatan Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Cipta Karya**

NO	JENIS PERALATAN	SAAT INI (TAHUN 2018)				KETERANGAN	
		JUMLAH ALAT		KONDISI ALAT			
		KANTOR PUSAT	BPT	BAIK	RUSAK (TIDAK BISA DIPAKAI)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Three Wheel Roller 6-8, 10-12 Ton	3	62		65	65	
2	Dump Truck 3-5 Ton	2	34	33	3	36	
3	Tandem Vibration Roller 2 Ton		40	40		40	
4	Tandem Vibration Roller 4 Ton	2	26	25	3	28	
5	Baby Roller	2	46	39	9	48	
6	Flat Bat Truck Crane 3-5 Ton	2	8	10		10	
7	Truck Trailler / Head Tracktor	3		2	1	3	
8	Bulldozer	1			1	1	
9	Motor Grader	2		1	1	2	
10	Whell Loader 1,2 / 1,5 M3	1	2	2	1	3	
11	Vibro Roller 8 Ton	2			2	2	
12	Crane On Wheel 15 Ton	2		1	1	2	
13	Tire Roller 8-10 Ton	4		2	2	4	
14	Crane On Track 35 Ton	1		1		1	
15	Pile Hammer 2,5 Ton	2		1	1	2	
16	Cold Milling 100 cm	2		1	1	2	
17	Cold Milling 60 cm	1		1		1	
18	Cold Milling 50 cm	2	1	3		3	
19	Mini Excavator	1	9	10		10	
20	Syndrome Road Maintenance Truck	1	1		1	2	
21	Portable Asphalt Mixing Plan (AMP)		3	2	1	3	
22	Generator Set	9			9	9	
23	Compresor	4		3	1	4	
24	Hydraulik Press / Manual Press	2		1	1	2	
25	Backhoe Loader	1	1	2		2	
26	Plat Tamper		26	23	3	26	
27	Water Pump	3	9	9	3	12	
28	Derek Crane Hydrolik Manual	3		1	2	3	
29	Grass Cutter	2	126	104	22	128	
30	Asphalt Sprayer		37	32	5	37	
31	Concrete Mixer		38	37	1	38	
32	Jack Hammer Elektrik	1	27	28		28	
33	Asphalt Cutter		27	27		27	
34	Las Listrik		9	9		9	

b. Asset Gedung dan Bangunan Kantor

Tabel 2.4 Asset Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

NO	Kantor	Gedung Kantor		Rumah Negara		Gudang		Tempat Ibadah		Pos Jaga		Garasi		Tempat Pertemuan		Olah Raga	
		Jumlah	Luas Lantai (M ²)	Jumlah	Luas Lantai (M ²)	Jumlah	Luas Lantai (M ²)	Jumlah	Luas Lantai (M ²)	Jumlah	Luas Lantai (M ²)	Jumlah	Luas Lantai (M ²)	Jumlah	Luas Lantai (M ²)	Jumlah	Luas Lantai (M ²)
1	Kantor Pusat	3	4.090,00	5	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BPTJ Semarang	1	708,00	-	-	2	36,00	1	24,00	1	9,00	1	90,00	1	132,00	1	351,00
3	BPTJ Surakarta	15	1.264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BPTJ Magelang	5	974,00	4	339,00	5	910,00	1	60,00	-	-	-	-	1	108,00	-	-
5	BPTJ Wonosobo	6	1.423,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPTJ Cilacap	2	504,00	4	1.062,00	1	40,00	1	55,00	1	8,00	2	576,00	1	58,00	1	187,00
7	BPTJ Tegal	10	1.505,00	8	938,00	1	80,00	1	56,00	1	4,00	1	200,00	1	200,00	1	140,00
8	BPTJ Pati	11	1.564,00	1	251,00	1	98,00	2	94,00	1	9,00	1	108,00	-	-	-	-
9	BPTJ Purwodadi	11	1.889,00	6	775,00	1	48,00	2	64,00	-	-	2	414,00	2	216,00	1	292,00
10	BPTJ Pekalongan	3	683,00	2	378,00	1	26,00	1	94,00	1	19,00	7	187,00	1	114,00	1	264,00
11	Balai Pengujian dan Peralatan	2	1.407,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,00	-	-	-	-
12	Balai Jasa Konstruksi dan Informasi	1	270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

2.3.1. Evaluasi Renstra 2013 – 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/2/2016 Tanggal 25 Januari 2016, panjang Jalan Provinsi sepanjang 2.404,741 km, kondisi Jalan Provinsi Tahun 2018 dalam kondisi baik 89,25%, sedang 10,75% dan rusak 0,00%. Sedangkan kondisi jembatan baik 84,20%, sedang 15,80% dan rusak 0,00%. Capaian kondisi jalan dan jembatan akhir tahun 2018 terhadap capaian kinerja tahun 2017 adalah; Kondisi jalan baik 89,25%, meningkat dari 88,92% dan kondisi jembatan baik 84,20% meningkat dari 83,61% meskipun adanya peningkatan kondisi jalan dan jembatan terus diupayakan, daya dukung Jalan provinsi masih belum optimal, mengingat masih adanya limpahan jalan alih status jalan kab menjadi jalan provinsi yang lebarnya < 6,00 m (3,5 m - 5,0 m) sepanjang 120 km.

Dari evaluasi dari 12 indikator secara keseluruhan dapat tercapai, hasilnya dapat dicermati pada Tabel 2.1, sedang untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dapat dicermati pada

Tabel

2.2.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase panjang jalan dengan lebar $\geq 6,00$ m	66,90	77,87		54,14	59,00	64,84	77,46	77,87	55,24	66,46	75,55	77,46	77,87	102,03	112,64	116,52	100,00	100,00
2	Persentase panjang jembatan dengan lebar $\geq 9,00$ m		84,27		78,92	79,72	80,85	82,30	84,27	80,22	81,43	83,00	82,30	84,27	101,65	102,15	102,66	100,00	100,00
3	Persentase panjang jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST $\geq 8,0$ Ton)		82,30		69,60	72,20	75,33	79,63	82,30	70,69	74,80	81,21	79,63	82,30	101,57	103,60	107,81	100,00	100,00
4	Persentase panjang Jembatan dengan beban sesuai standar Bina Marga		20,89		14,10	14,42	18,28	18,88	20,89	14,10	16,36	16,95	18,88	20,89	100,00	113,45	92,72	100,00	100,00
5	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik		89,60		86,92	87,56	88,88	88,92	89,60	86,92	88,27	88,88	88,92	89,60	100,00	100,81	100,00	100,00	100,00
6	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik		85,80		79,72	81,24	82,76	83,61	85,80	79,72	81,98	82,76	83,61	85,80	100,00	100,91	100,00	100,00	100,00
7	Persentase pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat)		89,84		84,26	85,66	87,05	88,28	89,84	48,56	86,72	87,05	88,28	89,84	57,63	101,24	100,00	100,00	100,00
8	Meningkatnya Persentase panjang jalan yang sudah dileger		94,60		76,00	80,60	85,20	89,80	94,60	81,87	87,68	92,39	89,80	94,60	107,72	108,78	108,44	100,00	100,00
9	Terfasilitasinya Prasarana Sarana Kebinamargaan		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Jumlah uji dan penyebaran informasi jakon																		
a. -	Sertifikat Hasil Uji		400					400	400			5849	3350				1462,25	837,50	
	- Informasi Konstruksi		4					4,00	4,00			13	4				325,00	100,00	
b. Jumlah pelaku jasa konstruksi			1050					970,00	1050			4153	1050,00				428,14	100,00	
12	Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi																		
a. Cakupan Air Minum Perkotaan			79,50					78,00	79,50			80,98	82,89				103,82	104,26	
b. Cakupan Air Minum Perdesaan			72,50					71,00	72,50			72,80	74,78				102,54	103,14	
c. Cakupan Sanitasi			81,50					80,00	81,50			80,00	82,00				100,00	100,61	

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan Persentase panjang jalan dengan lebar $\geq 6,00$ m; Persentase panjang jembatan dengan lebar $\geq 9,00$ m, Persentase panjang jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST $\geq 8,0$ Ton); Persentase panjang Jembatan dengan beban sesuai standar Bina Marga	619.593.041.000	1.424.250.464.000	1.904.277.596.000	557.235.120.000	349.184.082.000	601.653.584.300	1.416.335.519.764	1.899.368.973.746	539.504.837.544	76.189.258.750	97,10%	99,44%	99,74%	96,82%	21,82%			
2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Persentase panjang jalan dalam kondisi Permukaan dan bangunan pelengkap baik; Persentase panjang jembatan kondisi baik	342.277.085.000	417.833.074.000	313.682.159.000	222.160.474.000	395.153.590.000	335.935.485.501	413.439.002.454	309.724.874.938	219.194.803.267	121.838.182.302	98,15%	98,95%	98,74%	98,67%	30,83%			
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Persentase pemenuhan kebutuhan alat berat; Persentase Pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi.	36.813.613.000	46.740.587.000	42.504.822.000	20.371.639.000	27.904.357.000	34.813.613.000	45.570.451.941	39.746.279.945	18.297.043.315	8.447.976.814	94,57%	97,50%	93,51%	89,82%	30,27%			
4	Perencanaan dan Pengawasan Teknis jalan, Jembatan dan Keciptakaryaan Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan; Persentase panjang jalan yang dileger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
5	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Persentase akses aman air minum perkotaan; Persentase akses aman air minum perdesaan; Persentase akses sanitasi air limbah domestik.	-	-	-	-	5.463.751.000	3.900.000.000	-	-	-	4.988.081.658	1.985.014.874	0,00%	0,00%	0,00%	91,29%	50,90%		
6	Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi keandalan fisik sesuai standar; Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang	-	-	-	-	4.753.050.000	5.511.504.000	-	-	-	3.778.797.458	2.176.920.438	0,00%	0,00%	0,00%	79,50%	39,50%		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisis SWOT, merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas;
2. Adanya struktur organisasi Balai Pengelolaan Jalan yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk;
3. Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan;
4. Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/pembangunan/penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
5. Adanya peningkatan cakupan pelayanan akses air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan;
6. Adanya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat;
7. Adanya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian bangunan bersejarah;
8. Banyaknya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah;
9. Banyaknya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan;
10. Adanya penyebarluasan informasi tentang layanan pengujian dan informasi konstruksi.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai;
2. Banyaknya pemanfaatan Rumija yang tidak sesuai

- keperuntukannya;
3. Kurang optimalnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan;
 4. Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor;
 5. Masih terdapat ruas Jalan Provinsi yang belum memiliki bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/jembatan terganggu;
 6. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan maupun perdesaan;
 7. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan maupun perdesaan;
 8. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan sebagaimana pedoman teknis yang berlaku;
 9. Belum mantapnya koordinasi dalam pelestarian bangunan lama dan pengembangannya serta pengendalian teknis arsitektur jati diri;
 10. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi.
 11. Belum optimalnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi;
 12. Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan;
 13. Masih kurangnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi;
 14. Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi.
2. Analisis Faktor External

Analisis faktor eksternal terkait penanganan jalan kewenangan Provinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasi peluang-peluang (*opportunities*) dan ancaman-ancaman (*threats*) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut :

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
2. Adanya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;
3. Adanya peluang pengentasan kemiskinan melalui program padat karya di bidang Kebinamargaan dan Keciptakaryaan;
4. Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
5. Adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa *cold milling*, *rigid pavement* dan beton *pre-cast*;
6. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih;
7. Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah skala Lingkungan/kawasan/Kota;
8. Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat;

9. Meningkatnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian bangunan bersejarah;
 10. Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah;
 11. Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi sudah dilengkapi dengan laboratorium uji yang memadai;
 12. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi melalui sertifikasi;
 13. Sudah tersedia berbagai event di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi.
- b. Ancaman
1. Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton);
 2. Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
 3. Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
 4. Masih adanya kejadian bencana alam longsor, ambles yang mengancam konstruksi jalan dan jembatan;
 5. Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah provinsi;
 6. Kurang termanfaatkannya Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas pelayanan;
 7. Masih adanya ketidaksesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;
 8. Masih kurangnya koordinasi dalam pelestarian bangunan bersejarah;
 9. Masih adanya pelaku jasa konstruksi yang kurang kompeten mengakibatkan kurang tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi;
 10. Masih kurangnya peralatan laboratorium uji yang memadai;
 11. Berkurangnya penyelenggaraan event di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi.

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas dengan alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;
2. Manfaatkan adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/pembangunan/penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid pavement dan beton pre-cast;

3. Mengoptimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas guna mendukung Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
4. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan dengan adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
5. Mengatasi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen - segmen jalan di daerah perbatasan antar provinsi dengan memanfaatkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Program Strategis Nasional yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan;
6. Mengoptimalkan penanganan ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar kolektordengan memanfaatkan alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;
7. Mengatasi pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai peruntukannya dengan menerapkan peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
8. Mengatasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia dengan adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa *cold milling, rigid pavement* dan beton *pre-cast*;
9. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk menanggulangi semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan dan *over dimensi* (lebih dari MST 8 Ton);
10. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk menanggulangi semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
11. Mengoptimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas guna menanggulangi masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
12. Mengoptimalkan adanya struktur organisasi Balai Pengelolaan Jalan yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk untuk mengatasi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata di dalam wilayah provinsi;
13. Menanggulangi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar jalankolektor yang terkait dengan lebar, alinyemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil dan menghindari penggunaan galian Golongan C sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;

14. Mengatasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai untuk menanggulangi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah provinsi;
15. Manfaatkan Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas pelayanan;
16. Mengoptimalkan penyesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;
17. Mengatasi kurangnya koordinasi dalam pelestarian bangunan bersejarah dan pengembangannya serta pengendalian teknis arsitektur jati diri;
18. Mengatasi kurangnya pelaku jasa konstruksi yang kompeten sehingga terciptanya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
19. Mengoptimalkan penggunaan peralatan laboratorium uji untuk pengujian mutu bahan dalam kegiatan konstruksi;
20. Mengoptimalkan penyelenggaraan berbagai event di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi tentang layanan pengujian dan informasi konstruksi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Sistem jaringan jalan dan spesifikasi penyediaan prasarana jalan antara Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada beberapa koridor lintas belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang dipergunakan. Harus diakui bahwa belum tersinerginya Jalan Nasional dan Jalan Sub-Nasional dikarenakan adanya pemisahan tegas yang tertera dalam Undang-Undang No.38/2004 tentang Jalan yang berdasarkan pemikiran desentralisasi bidang jalan. Padahal, pada kenyataan di lapangan, seluruh jalan tanpa terkecuali merupakan bagian dari sektor transportasi, jika Jalan Nasional saja yang mantap sementara jalan daerah (Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak mantap, akhirnya biaya transportasi tetap tinggi karena ada bagian dari jalan yang rusak kondisinya.

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun sebelumnya menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan, tetapi juga masih terdapat beberapa kekurangan sehingga harus dievaluasi kembali. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap – tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor – faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor – faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor – faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Identifikasi dan pemetaan masalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah seperti Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

N o	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih terdapat potensi kerusakan jalan dan kemacetan pada segmen ruas jalan tertentu	Masih ada jalan provinsi yang belum memenuhi standar jalan kolektor	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ruas jalan dengan lebar kurang dari 7 m - Masih terdapat ruas jalan yang MST kurang dari 8 Ton - Terdapat perlintasan sebidang
		Terdapat ruas jalan yang berada di daerah dengan potensi rawan longsor, banjir dan tanah labil/bergerak.	Kurangnya bangunan pelengkap jalan (saluran, bangunan dinding penahan tanah)
2	Keterbatasan kuantitas ketersediaan air baku untuk air minum di wilayah tertentu.	Masih adanya wilayah yang belum memiliki sumber air baku yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan debit mata air - Adanya wilayah yang tidak memiliki cekungan air tanah - Debit air permukaan yang fluktuatif
3	Rendahnya Sumber Daya Manusia pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi.	Kurangnya pemahaman dan pelatihan masyarakat tentang pengelolaan air minum dan sanitasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kapasitas pengelola (teknis, kelembagaan dan keuangan)
4	Masih rendahnya kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah dan jasa konstruksi	Kurangnya informasi kondisi kelayakan bangunan gedung milik daerah dan kapasitas pelaku jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya informasi kondisi kelayakan bangunan gedung milik daerah - Terbatasnya tenaga ahli konstruksi

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi ketiga yaitu sebagai berikut :

“Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Jawa Tengah 2018-2023, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

1. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, (Tetep) mboten korupsi mboten ngapusi ”

2. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran kepemerintah kabupaten/kota;
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

3. Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Misi Kepala Daerah yang ke 3 (Tiga) yaitu *Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran* adalah dengan melaksanakan pengelolaan jalan provinsi untuk menjaga pelayanan jalan dalam rangka kelancaran arus penumpang dan arus barang dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di sekitar lokasi, sehingga diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Misi Kepala Daerah yang ke 3 (Tiga) sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dapat dituangkan pada tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana

- pemukiman dan bangunan gedung;
2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
 3. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
 4. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

Misi kepala daerah yang ke 3 (Tiga) yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang ke 1 (Satu) yaitu Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan gedung serta fungsi yang ke 2 (Dua) yaitu Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan gedung.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu melaksanakan Visi Pembangunan Jawa Tengah 2013-2018, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018-2023 terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera dan lestari, tentunya juga dilandasi oleh 'Isu Strategis' sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dimasa mendatang, serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang ke binamargaan kepada masyarakat dan bidang sarana dan prasarana permukiman dan bangunan gedung. Adapun Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur/Wakil Gubernur seperti Tabel 3.2.

Tabel 3.2
TelaahVisi, Misi, dan Program Gubernur/Wakil Gubernur

N o.	Visi/Misi/Prog ram Kerja Gubernur/Waki l Gubernur	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>Visi :</p> <p>Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, (Tetep) mboten korupsi mboten ngapusinya</p> <p>Misi ke :</p> <p>3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.</p>	<p>Tugas Pokok :</p> <p>Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, air limbah, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan.</p> <p>Fungsi :</p> <p>1. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan gedung.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan</p>	<p>a. Masih terdapat potensi kerusakan jalan dan kemacetan pada segmen ruas jalan tertentu</p>	<p>Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan lahan - Kondisi geografis <p>Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perda Nomor 8 Tahun 2016

		bangunan gedung		
		b. Keterbatasan kuantitas ketersediaan air baku untuk air minum di wilayah tertentu	Penghambat: - Keterbatasan debit mata air - Adanya wilayah yang tidak memiliki cekungan air tanah - Debit air permukaan yang fluktuatif Pendorong: - Misi Gubernur yang ke-4. - Adanyawilayah lain yang memiliki potensi air baku	
		c. Rendahnya Sumber Daya Manusia pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi.	Penghambat: - Keterbatasan kapasitas pengelola (teknis, kelembagaan dan keuangan) Pendorong: - Adanya BPSPAM dan KPP Sanitasi	

		d. Masih rendahnya kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah.	Penghambat: Kurangnya pengetahuan pengelola Bangunan Gedung Milik Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Pendorong: Bantuan teknis dan peningkatan SDM.
	3. Pelaksanaan, Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Ahli Bidang Jasa Konstruksi.	e. Masih rendahnya kualitas serta kompetensi pelaku jasa konstruksi.	Penghambat : Rendahnya motivasi untuk memperoleh Sertifikat Uji Kompetensi. Pendorong : Mendorong peningkatan Uji Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan

ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan suportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (*local capacity building*) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang kebinamargaan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Sedangkan infrastruktur bidang sarana dan prasarana permukiman dan bangunan gedung antara lain pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan akses 24 jam per hari; pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode ramah lingkungan serta sesuai standar teknis; bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan misi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum 2015 - 2019 pada misi yang ke-5 yaitu Mewujudkan bangsa yang berdayasaingsangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang ke-1 (Satu) yaitu Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan gedung dan fungsi ke-2 (Dua) yaitu Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana pemukiman dan

bangunan gedung.

Guna mendukung keterkaitan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk bidang kebinamargaan dalam mewujudkan misi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kinerja jalan dan jembatan sebagai jalan kolektor sekunder, sedang bidang keciptakaryaan dilakukan dukungan teknis agar terwujud Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi serta Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi untuk menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima; menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Tabel 3.3**Telaah Renstra Kementerian PUPR dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah**

No .	Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Misi yang ke-5 yaitu Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	<p>1. Fungsi ke-1 (Satu) yaitu Perumusan, pengordinasian dan pelaksanaan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan gedung</p> <p>2. Fungsi ke 2 (Dua) yaitu Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan gedung</p>	<p>a. Masih terdapat potensi kerusakan jalan dan kemacetan pada segmen ruas jalan tertentu</p> <p>b. Keterbatasan kuantitas ketersediaan air baku untuk air minum di wilayah tertentu</p> <p>c. Rendahnya Sumber Daya Manusia pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi.</p> <p>d. Masih rendahnya kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah dan jasa konstruksi</p>	<p>Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan kelas jalan antara jalan arteri dan jalan kolektor - Terkendala PP No 81 Th. 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga <p>Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perpres 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional - Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standarisasi Jalan Provinsi - Dukungan pemberian APBN (DAK, Hibah, Pamsimas dll).

3.4. Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD :

1. Telaah RTRW (Sesuai dengan Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029) :

Pada Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi, Pasal 19 huruf a tentang rencana pengembangan sistem prasarana transportasi jalan dan Pasal 20 (1) tentang Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi jalan, prasarana jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Jalan arteri primer;
- b. Jalan kolektor primer;
- c. Jalan strategis nasional;
- d. Jalan tol.

Rencana pengembangan jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a (sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR RI No. 248/KPTS/M/2015 tentang penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri, JAP dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

Rencana pengembangan jalan kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi ruas – ruas meliputi :

- a. Pejagan-Ketanggungan, Ketanggungan-Prupuk, Tegal-Slawi-Prupuk-Ajibarang-Purwokerto, Purwokerto -Sokaraja, Sokaraja-Purbalingga, Randu Dongkal-Bobotsari, Purbalingga-Bobotsari, Purbalingga-Klampok, Mandiraja-Gombong, Selokromo-Prembun, Banjarnegara-Wanayasa, Magelang-Salatiga, Boyolali-Klaten, Surakarta-Sukoharjo, Sukoharjo-Wonogiri ,Wonogiri-Biting, Prembun -Selokromo, Jati-Purwodadi, Purwodadi-Godong, Surakarta-Purwodadi-Pati, Kudus-Jepara, Boyolali-Blabak, Bumiayu-Randudongkal-Kebonagung-Bawang-Sukorejo-Cangkir-Ungaran, Weleri-Parakan, Bawang-Dieng, Slawi-Randudongkal, Randudongkal-Moga;
- b. Gubug-Kedungjati-Salatiga;
- c. Sruwen-Karanggede-Gemolong;
- d. Perbatasan Jawa Barat-Wangon-Purwokerto-Banyumas-Wonosobo-Secang;
- e. Semarang-Purwodadi-Blora dan Pengembangan ruas jalan Cepu-Blora-Rembang;
- f. Bandungsari-Penanggapan-Perbatasan Jawa Barat, Patimuan-Sidareja-Cilacap, Tawangmangu-Perbatasan Jawa Timur, Klaten-Cawas-Jentir, Sukoharjo-Watukelir, Wonogiri-Pacitan serta Wonogiri-Namengan (Perbatasan Yogyakarta);
- g. Bawang-Dieng;
- h. Kebumen-Karangsambung-Banjarnegara.

Rencana pengembangan jalan stategis nasional (sesuai dengan Kepmen PU No. 567/KPTS/M/2010 tentang rencana umum jaringan jalan nasional) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Jalan di sisi pantai selatan dari Cilacap (Slarang-Ayah), Kebumen - Purworejo - Perbatasan Yogyakarta;
- b. Wiradesa-Kalibening-Wanayasa-Batur-Dieng (Wonosobo);
- c. Rembang-Bulu-Blora-Cepu-Padangan (Perbatasan Jawa Timur).

Rencana pengembangan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. Pemantapan jalan tol Semarang Seksi A, Seksi B dan Seksi C;
- b. Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Solo;
- c. Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Demak-Kudus-Pati-Perbatasan Jawa Timur;
- d. Pengembangan jalan tol sepanjang Perbatasan Jawa Barat-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang;
- e. Pengembangan jalan tol sepanjang Solo-Sragen-Perbatasan Jawa Timur;
- f. Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta-Solo;
- g. Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta-Bawen;
- h. Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis-Cilacap-Yogyakarta;
- i. Pengembangan jalan tol sepanjang Pejagan-Cilacap.

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mengacu pada jalan provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/2/2016, tanggal 25 Januari 2016Penetapan Status RuasJalansebagaijalanProvinsi, juga menangani jalan yang sudah ada yaitu sebagian ruas jalan non status sepanjang 48,99Km yaitu pada Jalan Komplek Wisata Borobudur sepanjang 2,14 Km dan JJLS sepanjang 38,50 Km, sehingga telah sesuai dengan Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029.

Rencana pengembangan sistem perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat – pusat pelayanan desa secara hierarki pada kawasan – kawasan perdesaan dan kawasan – kawasan selain dari yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan meliputi : pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

Rencana pengembangan sistem perkotaan sesuai UU Penataan Ruang No.26 Tahun 2007 telah ditetapkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi :

- a. Kota – kota dengan fungsi sebagai PKN meliputi : kawasan perkotaan kedungsepur, surakarta dan cilacap.

- b. Kota – kota dengan fungsi sebagai PKW meliputi : Pekalongan, Magelang, Salatiga, Wonosobo, Klaten, Boyolali, Kebumen, Cepu, Purwokerto, Tegal dan Kudus.
- c. Kota – kota dengan fungsi PKL meliputi : Brebes, Slawi-Adiwerna, Kajen, Pemalang, Batang, Kendal, Wiradesa, Comal, Ampel, Bumiayu, Kroya, Ketanggungan, Weleri, Boja, Kaliwungu, Sukorejo, Demak, Purwodadi, Gubug, Godong, Juwana, Tayu, Pecangaan, Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, Jaten, Tawangmangu, Kartasura, Sukoharjo, Delanggu, Prambanan, Boyolali, Mungkid, Muntilan, Borobudur, Mertoyudan, Secang, Temanggung, Parakan, Banjarnegara, Klampok, Kebumen, Karanganyar (di Kebumen), Gombong, Purworejo, Purbalingga, Bobotsari, Majenang, Wangon, Ajibarang, Sokaraja dan Banyumas.

Sistem Perwilayahannya ditujukan sebagai arahan umum bagi para pelaku pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tentang keterkaitan fungsional kota – kota dan hinterland yang ada di Jawa Tengah. Sehingga suatu satuan wilayah dapat dipandang sebagai suatu subsistem kota – kota dan hinterlandnya dalam kesatuan sistem kota – kota dan hinterland lingkup Jawa Tengah.

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah di Provinsi Jawa Tengah meliputi sistem jaringan prasarana transportasi, sistem jaringan prasarana telekomunikasi, sistem jaringan prasarana sumber daya air, sistem jaringan prasarana energi dan sistem jaringan prasarana lingkungan.

2. Telaah KLHS :

Dasar Pelaksanaan KLHS Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Bab V tentang KLHS dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD. Langkah-langkah telaah KLHS yang terkait dengan Dinas Bina Marga adalah sebagaimana tabel berikut :

Upaya – upaya antisipatif dan upaya pengelolaan terhadap dampak yang mungkin timbul untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan dan mendukung tercapainya kelestarian lingkungan yaitu :

- a. Penataan lingkungan permukiman dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan;
- b. Meminimalisasi penggunaan air tanah sebagai air baku;
- c. Menggunakan material jalan dari bahan Galian C yang legal;
- d. Penebangan pohon ayoman akibat pelebaran jalan diganti dengan penanaman kembali dengan perbandingan 1:10;

- e. Desain konstruksi jalan yang ramah lingkungan dengan fasilitas bangunan pelengkap (saluran drainase, penghijauan tebing, dan lain-lain).

3.5. Penentuan Isu - isu Strategis :

Perangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di provinsi jawa tengah, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksi regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi jawa tengah secara regional dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah jawa tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Jawa Tengah yang belum kondisi baik dan memenuhi standart teknis pelayanan minimal jalan kolektor (lebar 7 meter dengan MST 8 Ton);
2. Adanya Perlintasan Sebidang rel kereta api di jalan kewenangan Provinsi dan persimpangan jalan kewenangan Provinsi dengan jalan kewenangan Nasional atau Kabupaten/ Kota yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan kecelakaan;
3. Kurangnya bangunan pelengkap jalan (saluran, bangunan dinding penahan tanah)terutama di daerah rawan bencana;
4. Belum optimalnya akses pelayanan air bersih;
5. Belum optimalnya akses pelayanan sanitasi;
6. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi;
7. Belum optimalnya kondisi layak Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.I. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

4.1.1 Tujuan

Untuk mendukung pencapaian tujuan daerah dalam menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan sesuai dengan standar jalan provinsi sebagai jalan kolektor;
- b. Meningkatnya Pelayanan Keciptakaryaan: Air Minum, Sanitasi, Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dan Jasa Kontruksi.

4.1.2 Sasaran

Sasaran akan menjadi pedoman dalam penyusunan kegiatan, alokasi sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penetapan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor;
- b. Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Baik;
- c. Meningkatkan akses aman air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat;

Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi tenaga ahli konstruksi.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan kualitas dan kapasitas sesuai dengan standar jalan provinsi sebagai jalan kolektor		Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	77,46	77,59	37,91	39,16	41,12	42,43	44,24	44,24
	Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	77,46	77,59	37,91	39,16	41,12	42,43	44,24	44,24
	Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan baik	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	88,92	89,60	90,20	90,80	91,50	92	92,50	92,50
Meningkatkan Pelayanan Keciptakaryaan: Air Minum, Sanitasi, Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dan Jasa Kontruksi		-	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Meningkatnya akses aman air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat	Persentase akses aman air aman perkotaan	%	80,98	84,15	86,15	88,15	90,15	92,15	94,15	94,15
		Persentase akses aman air aman perdesaan	%	72,80	74,55	76,30	78,05	79,80	81,55	83,30	83,30
		Persentase akses sanitasi air limbah	%	80	81,50	83,50	85,50	87,50	89,50	91,50	91,50
	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	9,14	10,15	11,17	12,18	13,20	14,21	15,23	15,23
Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah		Nilai kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa	Nilai kepuasan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa	Nilai SAKIP PD	%	63,74	77,17	77,67	78,27	78,97	79,77	80,77	80,77

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Uraian Umum

Infrastruktur di Jawa Tengah terutama Jalan Provinsi setelah alih status jalan dari Kabupaten/Kota yang belum memenuhi standarisasi Jalan Provinsi sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi. Terkait dengan hal tersebut untuk penguatan infrastruktur konektivitas melalui peningkatan jalan dan penggantian jembatan untuk pengembangan wilayah dan daya saing mendukung Misi ke-3 Gubernur yaitu “**Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran**“ antara lain :

- a. Jalan akses dan penghubung antar obyek pariwisata penghubung Borobudur – Dieng (ruas Magelang-Kaliangkrik-Sapuran-Kertek-Wonosobo-Dieng); penghubung obyek pariwisata Sangiran-Tawangmangu (Gemolong - Sragen – Karanganyar dan Palur – Karanganyar - Tawangmangu); penghubung obyek pariwisata Karimunjawa (ruas Jepara – Keling – Tayu - Pati).
- b. Jalan akses menuju kawasan industri terpadu dan penghubung antar Wilayah Pengembangan **Wanarakuti-Subosukawanrasaten** (Pati - Purwodadi - Gemolong - Surakarta); penghubung antar Wilayah Pengembangan **Bergasmalang - Petanglong - Kedungsepur** (ruas Jatinegara – Slawi, Kesesi/Bts.Kab. Pekalongan-Bantarbolang, Jatibarang – Ketanggungan, Slawi – Jatibarang/ Bts.Kab. Brebes, Randudongkal – Jatinegara Bts.Kab. Tegal, Kesesi/ Bts.Kab. Pekalongan – Bantarbolang, Kebonagung – Kesesi / Bts.Kab. Pekalongan, Kebonagung –Bts.Kab. Batang, Wonotunggal – Bts.Kab. Pekaongan, Batang – Wonotunggal – Surjo, Banyuputih – Plantungan / Bts. Kendal, Plantungan – Sukorejo/Blimbing, Cangkiran – Boja – Sukorejo, Cangkiran – Ungaran/Bts. Kodya Semarang, Fly Over Ganefo Mranggen); penghubung antar Wilayah Pengembangan **Bergasmalang - Barlingmascakeb** (ruas Kersana – Bandungsari – Salem, Pemalang – Randudongkal – Belik – Purbalingga – Bobotsari – Klampok – Purbalingga – Mandiraja – Ketileng – Gombong – Sempor, Menganti – Kesugihan, Buntu – Kroya – Slarang)
- c. Jalan perbatasan antar provinsi : **Jateng. - Jabar** (ruas Bandungsari – Penanggapan, Ketanggungan – Kersana – Bandungsari, Sidareja – Cukangleuleus); **Jateng – Jatim** (ruas Purwantoro – Nawangan/Bts. Prov.Jatim, Ngadirojo – Biting / Bts. Prov. Jatim, Karanganyar – Tawangmangu – Kalisoro, Kalisoro – Cemorosewu Bts. Prov. Jatim, Lasem – Sale/Bts. Prov. Jatim, Singget – Doplang – Cepu); **Jateng – DIY** (ruas Purworejo –

Sibolong Bts. DIY, Muntilan – Klangon Bts. DIY, Karangwuni – Cawas – Jentir, Namengan – Krendetan, Cawas – Krendetan – Watukelir – Grogol – Manyaran, Wuryantoro – Eromoko – Pracimantoro, Wonogiri – Manyaran – Blimbings).

- d. Penyediaan Pelayanan Dasar : Kerja sama dengan APBN membangun SPAM Regional Petanglong, Keburejo, Wososukas dan menyiapkan SPAM Regional Dadimuria; Pengembangan kapasitas layanan SPAM skala perkotaan dan perdesaan; Memenuhi kebutuhan air baku secara terkoordinasi lintas sektoral; Fasilitasi rencana pengembangan sarpras pengelolaan persampahan; Mengembangkan sarana prasarana sanitasi air limbah.
- e. Peningkatan SDM Jasa Konstruksi : Peningkatan kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi melalui fasilitasi Sertifikat Keahlian (SKA) dan tenaga terampil; Pengembangan informasi jasa konstruksi; Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia bantuan tenaga teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD);

5.1.1 Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijakan dan program yang diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam setiap tahunnya. Untuk melaksanakan strategi tersebut perlu didukung kebijakan yang bertujuan menunjang pencapaian visi dan misi Gubernur yakni dengan :

- a. Melakukan penanganan pelebaran jalan dengan menggunakan konstruksi beton, perkuatan tebing jalan, pembangunan saluran, perbaikan alinyemen horizontal dan vertikal serta penanganan pelebaran jembatan dengan tidak menutup pengembangan teknologi dan inovasi;
- b. Melakukan penanganan jalan dan jembatan untuk mempertahankan kondisi sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat kemendesakan;
- c. Membangun sistem layanan aman air minum perkotaan dan sanitasi dengan pendekatan regional;
- d. Memenuhi kebutuhan aman air minum perdesaan;
- e. Mendukung sistem layanan sanitasi layak;
- f. Membangun sistem layanan persampahan dengan pendekatan regional;
- g. Melakukan bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah;
- h. Pembinaan dan pelatihan teknis pelaku jasa konstruksi.

5.1.2 Kebijakan :

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah :

- a. Melaksanakan peningkatan jalan dan pembangunan jalan serta penggantian jembatan utamanya pada ruas jalan alih status jalan Kab/Kota. Melaksanakan peningkatan kapasitas/pelebaran jalan akses dan penghubung antar obyek pariwisata, Jalan penghubung antar Pengembangan Wilayah, Jalan akses menuju kawasan industri terpadu dan perbatasan antar provinsi.
- b. Melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan agar tetap dalam kondisi permukaan baik dan pemeliharaan rutin jembatan dalam kondisi baik;
- c. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk pembangunan SPAM Regional (Petanglong, Wososukas dan Keburejo) secara bertahap;
- d. Melakukan pendekatan pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS;
- e. Melakukan dukungan untuk pembangunan system pengelolaan air limbah domestik;
- f. Memberikan bantuan teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD);
- g. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Provinsi Sebagai Jalan Kolektor.	Meningkatkan besaran kualitas struktur dan kapasitas jalan dan jembatan sesuai standar jalan provinsi.	Melakukan penanganan pelebaran jalan dengan menggunakan konstruksi beton, perkuatan tebing jalan, pembangunan saluran, perbaikan alinyemen horizontal dan vertikal serta penanganan pelebaran jembatan satu sisi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan peningkatan jalan dan pembangunan jalan serta penggantian jembatan utamanya pada ruas jalan alih status jalan ex-Kab./Kota; 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas/pelebaran pada ruas jalan sejajar pantura, akses penghubung pantura pansela, akses penghubung antar pariwisata, jalan akses menuju kawasan insdustri terpadu dan perbatasan antar provinsi.
Meningkatnya kondisi permukaan dan bangunan pelengkap jalan baik.	Terjaganya kondisi badan jalan, permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan baik.	Melakukan penanganan jalan dan jembatan untuk mempertahankan kondisi sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat kemendesakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaaan rutin jalan agar tetap dalam kondisi permukaan baik dan pemeliharaan rutin jembatan dalam kondisi baik.
Meningkatnya pelayanan keciptakaryaan : Air minum perkotaan.	Meningkatkan akses aman air minum masyarakat perkotaan.	Membangun sistem layanan aman air minum perkotaan dan sanitasi dengan pendekatan regional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta sektor sumber daya air untuk pembangunan SPAM Regional secara bertahap.
Meningkatnya pelayanan keciptakaryaan : Air minum perdesaan.	Meningkatkan akses aman air minum masyarakat perdesaan.	Memenuhi kebutuhan aman air minum perdesaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan pendekatan pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS.
Meningkatnya pelayanan sanitasi	Meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat	Membangun sistem layanan sanitasi layak dengan pendekatan regional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sinkronisasi dengan APBN untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik regional
Meningkatnya kualitas hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD)	Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD)	Melakukan penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah melalui bantuan teknis.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memfasilitasi penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) melalui bantuan teknis.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai visi dan misi Gubernur dengan mengacu tujuan dan sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian Renstra 2018-2023, dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Penggantian Jembatan**

Program ini diarahkan pada peningkatan persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik di wilayah barat dan wilayah timur Jawa Tengah.

b. **Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Program ini diarahkan pada peningkatan pencapaian jalan provinsi dengan kondisi permukaan baik dan jembatan dalam kondisi baik yang dilaksanakan oleh seluruh balai pengelolaan jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

c. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**

Program ini diarahkan pada peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan, dan persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi.

d. **Program Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, dan Kciptakaryaan**

Program ini diarahkan pada peningkatan persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan, serta persentase panjang jalan yang dileger.

e. **Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi**

Program ini diarahkan pada peningkatan persentase akses aman air minum perdesaan; persentase akses aman air minum perkotaan; serta persentase akses sanitasi air limbah domestik.

f. **Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi**

Program ini diarahkan pada peningkatan persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar; dan persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi.

Secara rinci program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023**
(terlampir)

BAB VI

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
							2019		2020		2021		2022		2023													
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)							
Meningkatkan kualitas dan kapasitas sesuai dengan standar jalan provinsi sebagai jalan kolektor				Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	77,46	77,59	37,91		39,16		41,12		42,43		44,24		44,24										
Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor				Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	77,46	77,59	37,91		39,16		41,12		42,43		44,24		44,24										
		1.03.15	Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan						410.740.640		520.740.640		585.740.640		466.515.591		475.515.591		2.459.253.102									
				Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	0	0	35,65		36,48		38		38,76		40,13		40,13		Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur								
				Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	0	0	40,18		41,84		44,24		46,11		48,35		48,35		Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat								
		1.03.15.001	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 1						136.071.012		96.951.037		121.549.765		118.567.011		122.958.027		596.096.852	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1						Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat; PEMALANG; KEBUMEN; TEMANGGUNG; PURWOREJO; PEKALONGAN; BATANG; MAGELANG; Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat; PEMALANG; KEBUMEN; TEMANGGUNG; PURWOREJO; PEKALONGAN; BATANG; MAGELANG; Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat; PEMALANG; KEBUMEN; TEMANGGUNG; PURWOREJO; PEKALONGAN; BATANG; MAGELANG; Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat; PEMALANG; KEBUMEN; TEMANGGUNG; PURWOREJO; PEKALONGAN; BATANG; MAGELANG		
			Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1	Km	0	13,78	7,5	49.598.291	8,95	96.951.037	15,7	105.613.918	16,8	118.567.011	19,5	122.958.027	68,45	493.688.284										
			Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 1	m	0	317	300	51.949.292	100		60	15.935.847	0		0		360	67.885.139										
			Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (DAK)	Km	0	0	8,7	34.523.429	0		0		0		0		8,7	34.523.429										
		1.03.15.002	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 2						119.711.713		128.187.500		187.817.080		150.176.889		79.141.114		665.034.296	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2						Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat; BANJARNEGARA; CILACAP; BANYUMAS; WONOSOBO; BREBES; PURBALINGGA; TEMANGGUNG; TEGAL; Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat; BANJARNEGARA; CILACAP; BANYUMAS; WONOSOBO; BREBES; PURBALINGGA; TEMANGGUNG; TEGAL; Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat; BANJARNEGARA; CILACAP; BANYUMAS; WONOSOBO; BREBES; PURBALINGGA; TEMANGGUNG; TEGAL; Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat; BANJARNEGARA; CILACAP; BANYUMAS; WONOSOBO; BREBES; PURBALINGGA; TEMANGGUNG; TEGAL		
			Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 2	Km	0	10,46	10,67	84.711.713	15,9	128.187.500	13,65	89.621.004	7,7	57.463.354	10,29	79.141.114	58,21	439.124.685										
			Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 2	m	0	0	100	35.000.000	0		100	28.196.076	120	26.036.959	0		320	89.233.035										
			Panjang Pembangunan Jalan di Wilayah Barat 2	Km	0	0	0		0		4,7	70.000.000	0		0		4,7	70.000.000										
			Panjang Pembangunan Jalan (Perlitasan Tidak Sebidang)	Km	0	0	0		0		0		0		0,6	66.676.576	0		0,6	66.676.576								
		1.03.15.003	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 1						97.243.917		102.097.552		111.712.308		69.701.239		109.647.725		490.402.741	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1						Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur; GROBOGAN; BLORA; KUDUS; SRAGEN; JEPARA; REMBANG; PATI; Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur; GROBOGAN; BLORA; KUDUS; SRAGEN; JEPARA; REMBANG; PATI		
			Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Timur 1	Km	0	8,1	15,52	97.243.917	7,75	60.158.203	9,22	67.100.308	5,76	42.401.239	4,55	34.857.725	42,8	301.761.392										
			Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 1	m	0	0	0		139,8	41.939.349	155,8	44.612.000	91	27.300.000	249,3	74.790.000	635,9	188.641.349										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.15.004	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 2						57.713.998		193.504.551		164.661.487		128.070.452		163.768.725		707.719.213	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 2	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur; KENDAL; KOTA SURAKARTA; BOYOLALI; SUKOHARJO; DEMAK; WONOGIRI; KARANGANYAR; KOTA SEMARANG; KLATEN; SEMARANG; Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur; KENDAL; KOTA SURAKARTA; BOYOLALI; SUKOHARJO; DEMAK; WONOGIRI; KARANGANYAR; KOTA SEMARANG; KLATEN; SEMARANG; Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur; KENDAL; KOTA SURAKARTA; BOYOLALI; SUKOHARJO; DEMAK; WONOGIRI; KARANGANYAR; KOTA SEMARANG; KLATEN; SEMARANG; Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur; KENDAL; KOTA SURAKARTA; BOYOLALI; SUKOHARJO; DEMAK; WONOGIRI; KARANGANYAR; KOTA SEMARANG; KLATEN; SEMARANG;
			Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah timur 2	Km	0	11	9,5	57.713.998	9,45	63.636.409	25,67	138.291.487	16,43	104.340.452	21,4	117.178.725	82,45	481.161.071			
			Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 2	m	0	115	0		37,2	11.160.000	87,9	26.370.000	79,1	23.730.000	155,3	46.590.000	359,5	107.850.000			
			Panjang Pembangunan Jalan (Perlintasan Tidak Sebidang) di Wilayah timur 2	Km	0	0	0		1	118.708.142	0		0		0		1	118.708.142			
		1.03.17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan					19.573.688		21.531.057		22.379.490		12.288.932		10.851.366		86.624.533			
			Percentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan	%	88,28	89,84	93,05		94,62		95,33		97,68		100		100		Balai Pengujian dan Peralatan		
			Percentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	0	62,50	69,99		77,50		85		92,50		100		100		Balai Pengujian dan Peralatan		
		1.03.17.001	Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat					15.207.886		16.526.673		17.495.199		7.209.270		5.568.517		62.007.545	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	Balai Pengujian dan Peralatan; Balai Pengujian dan Peralatan	
			Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara	Unit	0	51	27	1.311.772	24	1.685.693	24	1.156.169	24	1.476.960	24	1.489.057	24	7.119.651			
			Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah	Unit	0	118	98	13.896.114	73	14.840.980	12	16.339.030	109	5.732.310	93	4.079.460	385	54.887.894			
		1.03.17.002	Pengadaan , Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah					2.613.750		2.613.750		2.827.032		2.940.113		3.057.718		14.052.363	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	Balai Pengujian dan Peralatan	
			Jumlah bronjong	Buah	0	0	4.000	2.613.750	4.000	2.613.750	4.000	2.827.032	4.000	2.940.113	4.000	3.057.718	20.000	14.052.363			
		1.03.17.003	Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik					1.752.052		2.390.634		2.057.259		2.139.549		2.225.131		10.564.625	SEKSI PENGUJIAN MUTU	Balai Pengujian dan Peralatan; Balai Pengujian dan Peralatan; Balai Pengujian dan Peralatan; Balai Pengujian dan Peralatan	
			Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu	Orang	0	150	100	672.592	100	965.860	100	1.004.494	100	1.044.673	100	1.086.459	500	4.774.078			
			Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi	Buah	0	1.080	750	274.050	750	772.518	750	374.420	750	389.396	750	404.971	3.750	2.215.355			
			Jumlah unit Pemeliharaan alat uji	Unit	0	77	77	34.760	80	179.816	84	187.008	87	194.488	91	202.270	91	798.342			
			Jumlah unit Penambahan alat uji	Unit	0	3	3	571.650	4	252.740	2	262.849	3	273.362	3	284.296	13	1.644.897			
			Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001	Dokumen	0	2	2	199.000	2	219.700	2	228.488	2	237.630	2	247.135	10	1.131.953			
		1.03.18	Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaan					54.910.725		57.239.849		33.993.642		35.842.015		35.717.668		217.703.899			
			Percentase panjang jalan yang dileger	%	89,80	89,84	96,30		97,05		98,43		99,02		100		100		Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan		
			Percentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutahirkan	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan		
		1.03.18.001	Pemutahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan, Keciptakaryaan					2.096.325		2.253.123		2.210.999		2.059.683		2.266.176		10.886.306	SEKSI RANCANG BANGUN	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; KOTA SEMARANG; Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; KOTA SEMARANG; Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; KOTA SEMARANG; Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; KOTA SEMARANG	
			Data Kondisi Jalan	Dokumen	0	1	1	1.161.325	1	1.445.063	1	1.232.050	1	1.256.691	1	1.294.392	1	6.389.521			
			Data Kondisi Jembatan	Dokumen	0	1	1	210.000	1	216.300	1	222.789	1	227.245	1	234.062	1	1.110.396			
			Jumlah perhitungan LHR	Dokumen	0	1	1	400.000	1	412.000	1	424.360	1	432.847	1	445.832	1	2.115.039			
			Panjang Jalan yang dileger	Km	0	124,85	40,89	325.000	17,98	179.760	33,18	331.800	14,29	142.900	29,19	291.890	135,53	1.271.350			
		1.03.18.002	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jalan Provinsi					2.229.650		711.950		1.862.500		745.000		524.500		6.073.600	SEKSI RANCANG BANGUN	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							2019		2020		2021		2022		2023							
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	Dokumen	0	8	12	2.229.650	6	711.950	10	1.862.500	4	745.000	2	524.500	34	6.073.600			
		1.03.18.003	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jalan Provinsi						20.929.607		23.373.661		23.981.541		22.748.898		23.175.890		114.209.597	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; KOTA SEMARANG; Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; KOTA SEMARANG	
				Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan	Dokumen	0	11	11	11.136.337	12	13.373.661	11	13.981.541	12	12.748.898	11	13.175.890	11	64.416.327			
				Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	Kegiatan	0	0	1	9.793.270	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	49.793.270			
		1.03.18.004	Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah						29.655.143		30.901.115		5.938.602		10.288.434		9.751.102		86.534.396	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; KOTA SEMARANG	
				Luas lahan jalan dan jembatan yang dibebaskan	m ²	0	0	8.222	29.655.143	14.000	30.901.115	4.751	5.938.602	5.539	10.288.434	3.900	9.751.102	36.412	86.534.396			
			Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan baik			Percentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	88,92	89,60	90,20		90,80		91,50		92		92,50				
		1.03.16	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi						255.879.442		270.567.145		284.631.494		299.898.610		300.102.712		1.411.079.403			
				Percentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal		%	0	0	87,12		87,23		87,72		88,08		88,43		88,43		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Percentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal		%	0	0	83,37		84,05		84,96		85,41		86,09		86,09		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Percentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan		%	0	0	94,89		95,04		95,70		96,18		96,65		96,65		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Percentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan		%	0	0	84,74		85,67		86,90		87,52		88,44		88,44		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Percentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap		%	0	0	90,70		90,79		91,18		91,47		91,75		91,75		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Percentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap		%	0	0	80,86		81,55		82,46		82,91		83,60		83,60		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Percentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang		%	0	0	96,33		96,46		97,05		97,47		97,89		97,89		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Percentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang		%	0	0	82,78		83,45		84,34		84,79		85,46		85,46		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Percentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang		%	0	0	90,74		91,45		92,41		92,88		93,60		93,60		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Percentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang		%	0	0	90,65		90,80		91,46		91,93		92,40		92,40		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Percentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo		%	0	0	96,12		96,27		96,93		97,40		97,87		97,87		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Percentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo		%	0	0	91,73		92,51		93,55		94,07		94,85		94,85		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Percentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati		%	0	0	86,45		86,61		87,32		87,83		88,33		88,33		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Percentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati		%	0	0	90,13		91,04		92,25		92,86		93,77		93,77		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Percentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi		%	0	0	81,71		81,94		82,96		83,69		84,41		84,41		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	0	0	86,34		87,54		89,14		89,93		91,13		91,13		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%	0	0	91,75		92,01		93,13		93,93		94,73		94,73		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%	0	0	89,91		91,45		93,49		94,52		96,05		96,05		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
		1.03.16.001	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1					5.862.691		5.513.795		5.294.230		5.189.688		5.160.472		27.020.876	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; KOTA SEMARANG; SEMARANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; KOTA SEMARANG; SEMARANG	
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 1	Km	0	127,49	128,64	4.660.991	127,93	4.558.115	121,65	4.334.390	118,79	4.232.488	116,86	4.199.352	116,86	21.985.336			
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 1	m	0	1.102,60	1.201,70	1.201.700	1.194,60	955.680	1.199,80	959.840	1.196,50	957.200	1.201,40	961.120	1.201,40	5.035.540			
		1.03.16.002	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1					9.947.025		6.570.580		4.187.813		12.688.250		12.317.233		45.710.901	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; SEMARANG; KOTA SEMARANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; SEMARANG; KOTA SEMARANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; SEMARANG; KOTA SEMARANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; SEMARANG; KOTA SEMARANG	
			Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Semarang 1	Km	0	9,59	4,04	9.350.017	2	4.445.674	1,23	2.735.111	4,35	11.277.250	5,28	11.722.233	16,9	39.530.285			
			Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Semarang 1	m	0	102,2	3,1	597.008	10,2	1.544.906	5	850.000	8,3	1.411.000	3,4	595.000	30	4.997.914			
			Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Semarang 1	Km	0	0	0		0,25	580.000	0,26	602.702	0		0		0,51	1.182.702			
			Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Semarang 1	Km	0	0	0		0		0		0		0		0				
		1.03.16.003	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2					3.704.551		3.316.180		3.291.120		3.213.164		3.221.538		16.746.553	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; DEMAK; KENDAL; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; DEMAK; KENDAL	
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 2	Km	0	86,48	86,48	2.940.051	84,04	2.701.060	83,41	2.680.720	80,88	2.599.564	81,27	2.611.938	81,27	13.533.333			
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 2	m	0	764,5	764,5	764.500	768,9	615.120	763	610.400	767	613.600	762	609.600	762	3.213.220			
		1.03.16.004	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2					1.532.812		8.056.000		2.517.973		8.713.370		9.061.903		29.882.058	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; DEMAK; KENDAL; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; DEMAK; KENDAL; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; DEMAK; KENDAL; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; DEMAK; KENDAL	
			Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Semarang 2	m	0	32,9	7,5	1.532.812	3,1	512.000	9	1.651.503	5	998.000	10	2.196.000	34,6	6.890.315			
			Rehabilitasi Jalan di Wilayah Semarang 2	Km	0	0	0		2,7	5.996.000	0		2,9	7.715.370	2	5.919.392	7,6	19.630.762			
			Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Semarang 2	Km	0	0	0		0,21	1.108.100	0,06	583.440	0		0,03	173.467	0,3	1.865.007			
			Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Semarang 2	Km	0	0	0		0,53	439.900	0,31	283.030	0		0,48	773.044	1,32	1.495.974			
		1.03.16.005	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1					5.725.037		5.961.755		5.975.607		5.957.191		6.077.985		29.697.575	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; PATI; REMBANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; PATI; REMBANG	
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 1	Km	0	140,8	138,35	4.483.737	136,8	4.968.315	137,38	4.989.367	137,08	4.978.471	140,08	5.087.425	140,08	24.507.315			
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 1	m	0	1.191,20	1.241,30	1.241.300	1.241,80	993.440	1.232,80	986.240	1.223,40	978.720	1.238,20	990.560	1.238,20	5.190.260			
		1.03.16.006	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1					9.480.905		8.831.390		12.531.654		14.484.007		6.338.518		51.666.474	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; PATI; REMBANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; PATI; REMBANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; PATI; REMBANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; PATI; REMBANG	
			Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pati 1	Km	0	3	1,95	2.050.000	1,3	820.000	0,8	495.000	1,25	775.000	1,5	925.000	6,8	5.065.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pati 1	Km	0	1,5	3	6.215.905	3,5	5.311.390	3,65	5.536.654	4,5	6.809.007	1,75	2.763.518	16,4	26.636.474		
				Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pati 1	m	0	52	4,5	1.215.000	4	1.000.000	13	3.500.000	21,6	4.900.000	7,6	1.150.000	50,7	11.765.000		
				Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pati 1	Km	0	0	0		1,7	1.700.000	3	3.000.000	2	2.000.000	1,5	1.500.000	8,2	8.200.000		
		1.03.16.007	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2					5.169.875		5.657.090		5.823.855		5.748.800		5.780.874		28.180.494	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; KUDUS; JEPARA; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; KUDUS; JEPARA	
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 2	Km	0	119,4	115,9	3.859.755	118,05	4.504.594	122,42	4.671.359	120,62	4.602.424	121,52	4.637.098	121,52	22.275.230		
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 2	m	0	1.416,12	1.320,12	1.310.120	1.440,62	1.152.496	1.440,62	1.152.496	1.432,97	1.146.376	1.429,72	1.143.776	1.429,72	5.905.264		
		1.03.16.008	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2					7.720.485		10.523.150		6.796.287		11.488.974		10.955.234		47.484.130	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; JEPARA; KUDUS; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; JEPARA; KUDUS; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; JEPARA; KUDUS; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; JEPARA; KUDUS	
				Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pati 2	Km	0	0	1	750.000	0,5	2.500.000	0,15	750.000	0,25	1.250.000	0,2	1.000.000	2,1	6.250.000		
				Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pati 2	Km	0	0	1,25	2.053.668	2,95	5.223.150	1,8	3.646.287	3,51	5.638.974	3,15	5.097.234	12,66	21.659.313		
				Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pati 2	m	0	13	125	3.850.000	4,5	1.200.000	14,7	1.200.000	12,15	3.300.000	15,4	4.158.000	301,6	13.708.000		
				Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pati 2	Km	0	2,7	0,7	1.066.817	1,6	1.600.000	1,7	1.200.000	1,2	1.300.000	0,7	700.000	5,9	5.866.817		
		1.03.16.009	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1					8.359.769		6.599.707		6.938.117		6.887.795		6.952.076		35.737.464	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; GROBOGAN; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; GROBOGAN	
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 1	Km	0	181,18	185,73	6.521.329	176,56	5.059.915	187,62	5.387.605	187,51	5.373.763	188,69	5.407.724	188,69	27.750.336		
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 1	m	0	1.906,64	1.935,64	1.838.440	1.924,74	1.539.792	1.878,54	1.550.512	1.892,54	1.514.032	1.930,44	1.544.352	1.930,44	7.987.128		
		1.03.16.010	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1					10.270.469		11.763.341		8.987.484		12.683.973		15.318.741		59.024.008	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; GROBOGAN; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; GROBOGAN; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; GROBOGAN	
				Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 1	Km	0	5,2	0,6	7.620.469	0,62	9.513.341	1,34	7.187.484	0,46	7.638.171	0,63	12.668.741	3,65	44.628.206		
				Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Purwodadi 1	Km	0	1,9	0		0		0		1,37	3.545.802	0		1,37	3.545.802		
				Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Purwodadi 1	m	0	51,4	20,4	2.650.000	11,4	2.250.000	17,9	1.800.000	63,5	1.500.000	25,6	2.650.000	138,8	10.850.000		
		1.03.16.011	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2					10.170.820		7.909.630		7.985.684		8.054.549		8.064.052		42.184.735	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; BLORA; SRAGEN; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; BLORA; SRAGEN	
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 2	Km	0	192,01	191,49	8.627.260	194,61	6.734.030	194,7	6.737.204	197,03	6.817.829	197,52	6.834.612	197,52	35.750.935		
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 2	m	0	1.508,70	1.584	1.543.560	1.469,50	1.175.600	1.560,60	1.248.480	1.545,90	1.236.720	1.536,80	1.229.440	1.536,80	6.433.800		
		1.03.16.012	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2					7.643.536		9.693.839		13.241.760		10.724.493		10.542.068		51.845.696	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; BLORA; SRAGEN; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; BLORA; SRAGEN; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; BLORA; SRAGEN; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; BLORA; SRAGEN	
				Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 2	Km	0	1,5	0		0,15	621.819	0		0,88	4.087.354	0,94	5.073.282	1,97	9.782.455		
				Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Purwodadi 2	m	0	81,9	0		6	600.000	23,4	2.392.048	38,1	3.900.000	47,2	4.500.000	114,7	11.392.048		
				Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Purwodadi 2	Km	0	0	3	7.643.536	2	8.472.020	0		0		0		5	16.115.556		
				Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Purwodadi 2	Km	0	1,15	0		0		4,06	10.849.712	0,93	2.737.139	0,3	968.786	5,29	14.555.637		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.16.013	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1					4.559.645		4.766.575		4.757.912		4.900.837		4.895.407		23.880.376	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; MAGELANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; MAGELANG	
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 1	Km	0	102,67	112,88	3.809.395	112,61	4.245.335	110,52	4.151.792	114,48	4.300.557	114,18	4.289.287	114,18	20.796.366			
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 1	m	0	757,65	750,25	750.250	651,55	521.240	757,65	606.120	750,35	600.280	757,65	606.120	757,65	3.084.010			
		1.03.16.014	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1					9.419.514		7.941.969		11.212.663		9.836.965		6.240.145		44.651.256	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; MAGELANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; MAGELANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; MAGELANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; MAGELANG	
			Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Magelang 1	Km	0	0	7,1	5.921.855	5	5.172.647	6,57	7.071.238	0		1,8	2.115.691	13,37	20.281.431			
			Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Magelang 1	Km	0	0	0,84	2.398.703	0,59	539.776	0,59	3.024.376	1,2	5.629.874	0,2	1.103.954	3,42	12.696.683			
			Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Magelang 1	Km	0	10	0		1	1.074.085	1	1.117.049	3	3.000.000	2,5	3.020.500	7,5	8.211.634			
			Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Magelang 1	m	0	40,5	7,4	1.098.956	7,6	1.155.461	0		7,3	1.207.091	0		20,8	3.461.508			
		1.03.16.015	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2					7.527.440		7.706.269		7.973.903		7.794.441		7.851.804		38.853.857	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; KEBUMEN; PURWOREJO; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; KEBUMEN; PURWOREJO	
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 2	Km	0	128,08	153,35	6.181.710	164,85	6.623.205	168,18	6.890.839	163,8	6.711.377	165,2	6.768.740	165,2	33.175.871			
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 2	m	0	1.353,83	1.345,73	1.345.730	1.353,83	1.083.064	1.353,83	1.083.064	1.353,83	1.083.064	1.353,83	1.083.064	1.353,83	5.677.986			
		1.03.16.016	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2					7.025.265		8.531.965		5.660.931		9.147.248		8.340.016		38.705.425	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; KEBUMEN; PURWOREJO; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; KEBUMEN; PURWOREJO; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; KEBUMEN; PURWOREJO	
			Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Magelang 2	Km	0	0	4	3.048.384	4,7	6.010.009	0		0		0		8,7	9.058.393			
			Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Magelang 2	Km	0	0	0,3	980.500	0,3	1.458.099	0,67	3.448.110	7,05	8.679.305	0,6	3.340.016	8,92	17.906.030			
			Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Magelang 2	Km	0	3,28	1,5	1.224.623	1	1.063.857	2	2.212.821	0		5,05	5.000.000	9,35	9.501.301			
			Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Magelang 2	m	0	12	8,1	1.771.758	0		0		4	467.943	0		8,1	2.239.701			
		1.03.16.017	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1					7.829.902		6.506.660		7.421.642		7.432.530		7.434.058		36.624.792	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; BANJARNEGARA; TEMANGGUNG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; BANJARNEGARA; TEMANGGUNG	
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 1	Km	0	136,9	137,69	6.432.202	137,34	5.388.980	160,26	6.288.602	160,46	6.296.450	160,66	6.304.298	160,66	30.710.532			
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 1	m	0	1.370,80	1.408,50	1.397.700	1.397,10	1.117.680	1.416,30	1.133.040	1.420,10	1.136.080	1.412,20	1.129.760	1.412,20	5.914.260			
		1.03.16.018	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1					8.841.460		9.108.315		10.221.050		9.012.650		9.969.300		47.152.775	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; TEMANGGUNG; BANJARNEGARA; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; TEMANGGUNG; BANJARNEGARA; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; TEMANGGUNG; BANJARNEGARA; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; TEMANGGUNG; BANJARNEGARA	
			Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Wonosobo 1	Km	0	0	0		2	2.813.315	2,5	4.071.050	2,5	3.862.650	2,5	4.419.300	9,5	15.166.315			
			Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Wonosobo 1	Km	0	0,04	0,1	826.460	0,1	1.000.000	0,1	1.000.000	0,2	2.400.000	0		0,5	5.226.460			
			Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Wonosobo 1	Km	0	3	2,9	5.235.000	0		1,3	2.750.000	1	2.000.000	1	1.750.000	6,2	11.735.000			
			Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Wonosobo 1	m	0	60,3	20,6	2.780.000	32	5.295.000	12,8	2.400.000	9	750.000	16,9	3.800.000	91,3	15.025.000			
		1.03.16.019	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2					5.690.432		4.786.520		3.992.786		4.005.933		4.049.550		22.525.221	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; WONOSOBO; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2	Km	0	103,76	109,01	4.830.232	102,7	4.089.240	83,34	3.318.226	83,19	3.312.253	84,84	3.377.950	84,84	18.927.901		
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	m	0	845,2	860,2	860.200	871,6	697.280	843,2	674.560	867,1	693.680	839,5	671.600	839,5	3.597.320		
		1.03.16.020	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2						6.268.575		10.382.864		9.042.860		8.982.440		9.465.800		44.142.539	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; WONOSOBO; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; WONOSOBO; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; WONOSOBO; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; WONOSOBO
				Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Wonosobo 2	Km	0	0	0		4	4.972.175	3	3.962.860	2	2.862.440	1	1.565.800	10	13.363.275		
				Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Wonosobo 2	Km	0	0	0,15	3.043.575	0,16	3.490.000	0,1	2.100.000	0,05	1.070.000	0,1	2.200.000	0,56	11.903.575		
				Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Wonosobo 2	Km	0	7,4	0		1,5	1.420.689	1,5	2.080.000	2,7	4.100.000	2	3.800.000	7,7	11.400.689		
				Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	m	0	30,5	21,5	3.225.000	4,1	500.000	32,5	900.000	8,6	950.000	36,2	1.900.000	102,9	7.475.000		
		1.03.16.021	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1						8.705.360		7.996.686		8.413.317		8.425.772		8.418.820		41.959.955	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta; KARANGANYAR; KLATEN; BOYOLALI; KOTA SURAKARTA; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta; KARANGANYAR; KLATEN; BOYOLALI; KOTA SURAKARTA
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	Km	0	188,53	191,04	7.427.460	182,11	7.100.526	188,99	7.362.677	189,34	7.382.172	189,49	7.388.020	940,8	36.660.855		
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	m	0	1.190,30	1.277,90	1.277.900	1.120,20	896.160	1.313,30	1.050.640	1.304,50	1.043.600	1.288,50	1.030.800	6.304,40	5.299.100		
		1.03.16.022	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1						6.545.500		6.907.370		8.215.727		6.346.487		6.088.878		34.103.962	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; KLATEN; KOTA SURAKARTA; KARANGANYAR; BOYOLALI; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; KLATEN; KOTA SURAKARTA; KARANGANYAR; BOYOLALI; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; KLATEN; KOTA SURAKARTA; KARANGANYAR; BOYOLALI; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; KLATEN; KOTA SURAKARTA; KARANGANYAR; BOYOLALI
				Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Surakarta 1	Km	0	0	0		3,2	1.713.045	2,9	1.839.919	2	3.202.306	1,7	1.825.738	9,8	8.581.008		
				Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Surakarta 1	Km	0	0	0		0,15	854.325	0,15	185.808	0,5	681.381	0,5	689.140	1,3	2.410.654		
				Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Surakarta 1	Km	0	0	0		0,28	340.000	0,15	190.000	0,2	312.800	0,35	424.000	0,98	1.266.800		
				Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Surakarta 1	m	0	37,9	47,7	6.545.500	49	4.000.000	8,3	6.000.000	17,1	2.150.000	33,1	3.150.000	155,2	21.845.500		
		1.03.16.023	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2						12.235.830		10.971.442		11.083.366		11.133.040		11.090.716		56.514.394	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; SUKOHARJO; WONOGIRI; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; SUKOHARJO; WONOGIRI
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	Km	0	231,09	230,09	9.144.830	229,44	8.413.682	232,26	8.517.206	233,8	8.573.680	232,84	8.538.476	1.158,43	43.187.874		
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2	m	0	3.166,90	3.091	3.091.000	3.197,20	2.557.760	3.207,70	2.566.160	3.178,20	2.559.360	3.199,20	2.552.240	15.885,40	13.326.520		
		1.03.16.024	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2						8.559.500		8.774.402		10.166.617		8.849.296		12.103.831		48.453.646	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; WONOGIRI; SUKOHARJO; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; WONOGIRI; SUKOHARJO; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; WONOGIRI; SUKOHARJO; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.; WONOGIRI; SUKOHARJO
				Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Surakarta 2	Km	0	0	2,5	3.809.500	2,65	6.010.994	3,1	6.070.672	2,2	4.901.514	2,5	5.584.138	12,95	26.376.818		
				Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Surakarta 2	Km	0	0	0		0		0,03	1.270.945	0,04	1.200.000	0,3	2.269.693	0,37	4.740.638		
				Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Surakarta 2	Km	0	0	0		0,5	713.408	1,2	1.425.000	0,55	847.782	0,95	1.500.000	3,2	4.486.190		
				Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Surakarta 2	m	0	62,4	124,8	4.750.000	18,6	2.050.000	8,1	1.400.000	16,6	1.900.000	25,5	2.750.000	190,6	12.850.000		
		1.03.16.025	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1						3.940.131		3.329.450		3.397.257		3.379.647		3.397.628		17.444.113	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; CILACAP; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							2019		2020		2021		2022		2023							
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 1	Km	0	0	72,45	3.097.231	71,62	2.655.130	73,45	2.722.937	72,97	2.705.327	73,46	2.723.308	73,46	13.903.933			
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 1	m	0	0	842,9	842.900	842,9	674.320	842,9	674.320	842,9	674.320	842,9	674.320	842,9	3.540.180			
		1.03.16.026	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1						7.325.925		9.475.032		9.601.711		10.031.412		10.029.619		46.463.699	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; CILACAP; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; CILACAP; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; CILACAP; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; CILACAP	
				Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Cilacap 1	Km	0	0,07	1,14	5.725.925	0,87	7.915.232	0,45	2.748.300	0		0		2,46	16.389.457			
				Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Cilacap 1	m	0	0	8	1.600.000	0		0		0		0		8	1.600.000			
				Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Cilacap 1	Km	0	0,01	0		0		2	4.554.411	3,08	8.060.832	2	7.569.719	7,08	20.184.962			
				Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Cilacap 1	m	0	0	0		0,7	1.559.800	0,7	2.299.000	0,55	1.970.580	0,64	2.459.900	2,59	8.289.280			
		1.03.16.027	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2						4.242.900		3.561.305		3.668.684		3.599.782		3.636.443		18.709.114	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; BANYUMAS; PURBALINGGA; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; BANYUMAS; PURBALINGGA	
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 2	Km	0	0	72,56	3.122.700	69,3	2.640.505	71,78	2.735.004	69,98	2.666.422	70,98	2.704.523	70,98	13.869.154			
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 2	m	0	0	1.120,20	1.120.200	1.151	920.800	1.167,10	933.680	1.166,70	933.360	1.164,90	931.920	1.164,90	4.839.960			
		1.03.16.028	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2						4.803.390		8.606.102		11.733.171		13.883.509		11.328.750		50.354.922	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; PURBALINGGA; BANYUMAS; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; PURBALINGGA; BANYUMAS; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; PURBALINGGA; BANYUMAS	
				Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Cilacap 2	m	0	5,8	61,5	4.803.390	27,7	3.100.278	10,6	2.565.050	11	1.787.000	12,8	2.250.000	123,6	14.505.718			
				Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Cilacap 2	Km	0	4,04	0		0,5	559.824	2	8.213.861	4	12.096.509	3	9.078.750	9,5	29.948.944			
				Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Cilacap 2	Km	0	0	0		0,75	3.010.000	0,2	954.260	0		0		0,95	3.964.260			
				Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Cilacap 2	Km	0	0	0		1,2	1.936.000	0		0		0		1,2	1.936.000			
		1.03.16.029	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1						3.605.460		3.673.450		3.752.338		3.801.213		3.756.098		18.588.559	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; TEGAL; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; TEGAL	
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 1	Km	0	0	78,92	2.846.060	81,55	3.065.930	83,52	3.140.018	84,82	3.188.893	83,62	3.143.778	83,62	15.384.679			
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 1	m	0	0	759,4	759.400	759,4	607.520	765,4	612.320	765,4	612.320	765,4	612.320	765,4	3.203.880			
		1.03.16.030	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1						10.792.608		13.352.582		19.472.661		9.013.790		13.719.368		66.351.009	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; TEGAL; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; TEGAL; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; TEGAL; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; TEGAL	
				Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 1	Km	0	0	0,55	3.418.626	0,8	7.046.600	0,6	6.411.064	0,4	3.790.000	0,6	6.000.000	2,95	26.666.290			
				Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Tegal 1	Km	0	0	4	5.675.022	1,4	3.592.817	2,6	11.640.597	1	3.062.658	1,5	5.195.368	10,5	29.166.462			
				Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Tegal 1	m	0	0	6	1.300.000	6	1.300.000	0		0		5		17	2.600.000			
				Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Tegal 1	Km	0	0	0,5	398.960	1,35	1.413.165	1,25	1.421.000	1,75	2.161.132	2	2.524.000	6,85	7.918.257			
		1.03.16.031	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2						4.635.500		4.138.340		4.287.613		4.276.037		4.234.776		21.572.266	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; BREBES; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; BREBES	
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 2	Km	0	0	94,72	3.397.800	92,82	3.144.100	97,22	3.293.133	96,72	3.276.197	95,62	3.238.936	95,62	16.350.166			
				Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 2	m	0	0	1.249,80	1.237.700	1.242,80	994.240	1.243,10	994.480	1.249,80	999.840	1.244,80	995.840	1.244,80	5.222.100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.16.032	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2					8.666.282		11.021.739		10.852.214		10.832.638		15.068.345		56.441.218	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; BREBES; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; BREBES; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; BREBES; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; BREBES	
			Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 2	Km	0	0	0,5	3.176.040	0,5	4.434.753	0	0	0	0	0,6	6.000.000	1,6	13.610.793			
			Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Tegal 2	Km	0	0	4,5	5.490.242	1	3.106.616	2,5	8.890.214	3	10.475.301	1,5	4.604.745	12,5	32.567.118			
			Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Tegal 2	m	0	0	0		7	1.500.000	6,7	1.962.000	2	357.337	5	2.000.000	20,7	5.819.337			
			Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Tegal 2	Km	0	0	0,5		1,9	1.980.370	0		0		2	2.463.600	4,4	4.443.970			
		1.03.16.033	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1					7.906.134		7.332.285		7.492.656		7.473.062		7.522.010		37.726.147	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG; PEKALONGAN; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG; PEKALONGAN	
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 1	Km	0	0	154,28	6.335.384	152,76	6.033.685	156,86	6.195.656	156,37	6.176.302	157,67	6.227.650	157,67	30.968.677			
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 1	m	0	0	1.570,75	1.570.750	1.623,25	1.298.600	1.621,25	1.297.000	1.620,95	1.296.760	1.617,95	1.294.360	1.617,95	6.757.470			
		1.03.16.034	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1					7.330.452		7.364.735		11.469.208		12.947.866		9.596.282		48.708.543	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; BATANG	
			Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pekalongan 1	Km	0	0	1,12	3.625.452	0	0	0	0	0	0	0	1,12	3.625.452				
			Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pekalongan 1	Km	0	0	0		2,74	5.084.735	3,04	8.889.208	3,53	10.322.866	2,23	6.521.282	11,54	30.818.091			
			Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pekalongan 1	m	0	0	24,7	3.705.000	15,2	2.280.000	17,2	2.580.000	17,5	2.625.000	20,5	3.075.000	95,1	14.265.000			
		1.03.16.035	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2					4.537.295		4.188.885		4.192.213		4.181.093		4.147.256		21.246.742	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; PEMALANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; PEMALANG	
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2	Km	0	0	90,02	3.727.395	88,82	3.345.605	88,07	3.317.333	88,07	3.317.333	87,52	3.296.616	87,52	17.004.282			
			Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	m	0	0	809,9	809.900	1.054,10	843.280	1.093,60	874.880	1.079,70	863.760	1.063,30	850.640	1.063,30	4.242.460			
		1.03.16.036	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2					9.296.967		9.745.746		12.977.410		14.776.668		17.927.118		64.723.909	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; PEMALANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; PEMALANG; Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; PEMALANG	
			Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pekalongan 2	Km	0	0	1,5	4.109.881	2,5	3.555.000	1,5	4.050.000	1,65	4.455.000	1,8	4.860.000	8,95	21.029.881			
			Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	m	0	0	28,2	4.230.000	44	2.460.000	4,5	675.000	18,4	2.760.000	34,8	4.720.000	133,9	14.845.000			
			Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pekalongan 2	Km	0	0	1,15	957.086	0,4	510.000	0,7	595.000	0,8	680.000	0,85	722.500	3,9	3.464.586			
			Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pekalongan 2	Km	0	0	0		1	3.220.746	2,4	7.657.410	2,15	6.881.668	2,5	7.624.618	8,05	25.384.442			
Meningkatkan Pelayanan Kecipatkaryaan: Air Minum, Sanitasi, Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dan Jasa Kontruksi			-	%	0	0	0		0		0		0		0		0				
			Meningkatnya akses aman air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat					Persentase akses aman air aman perkotaan	%	80,98	84,15	86,15	88,15	90,15	92,15	94,15	94,15				
			Persentase akses aman air aman perdesaan	%	72,80	74,55	76,30		78,05		79,80		81,55		83,30		83,30				
			Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%	80	81,50	83,50		85,50		87,50		89,50		91,50		91,50				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	Kabupaten/n/Kota	0	16	16	146.500	16	150.000	16	155.000	16	160.000	16	165.000	16	776.500		
				Jumlah bangunan gedung milik daerah yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik	Dokumen	0	1	1	296.071	1	345.750	1	320.000	1	330.000	1	340.000	1	1.631.821		
				Jumlah kegiatan bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	Kegiatan	0	1	1	75.000	1	77.500	1	80.000	1	82.500	1	85.000	1	400.000		
				Jumlah Pendataan teknis BGMD Prov Jateng	Dokumen	0	1	1	203.500	1	210.000	1	220.000	1	230.000	1	240.000	1	1.103.500		
				Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung bagi SKPD Teknis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Kegiatan	0	0	1	75.000	1	77.500	1	80.000	1	82.500	1	85.000	1	400.000		
				Belanja Hibah Konstruksi, Tahap 1, UKL/UPL, DED, konstruksi dan Pengawasan konstruksi (Gedung Kejati Jawa Tengah)	Kegiatan	0	0	1	10.000.000	1	6.000.000	0		0		0		0	16.000.000		
				Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk pengguna jasa	Orang	0	0	0		60	40.000	80	40.000	80	40.000	80	40.000	80	160.000		
				Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa	Orang	0	0	0		60	40.000	80	40.000	80	40.000	80	40.000	80	160.000		
				Rakor TPJK Kab./Kota	Orang	0	0	0		100	75.000	120	78.000	120	80.000	120	80.000	120	313.000		
				Forum Jasa Konstruksi daerah	Orang	0	0	0		100	75.000	100	78.000	100	80.000	100	80.000	100	313.000		
				Focus Group Discussion	Orang	0	0	0		100	80.000	160	120.000	120	93.440	160	132.378	160	425.818		
				Pembangunan Masjid Agung Magelang	Unit	0	0	0		1	5.317.471	1	111.234.750	1	312.189.310	1	13.415.940	1	442.157.471		
	1.03.20.003	Pembinaan Jasa Konstruksi							900.000		577.850		704.250		704.250		704.250		3.590.600	Balai Jasa Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi; KOTA SEMARANG
				Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	Orang	0	0	200	900.000	160	577.850	160	704.250	160	704.250	160	704.250	840	3.590.600		
	1.03.20.004	Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi							500.000		330.000		350.000		388.000		392.432		1.960.432	Balai Jasa Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi; KOTA SEMARANG
Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah				Jumlah penerbitan HSPK	Dokumen	0	0	3	500.000	2	330.000	2	350.000	2	388.000	2	392.432	11	1.960.432		
	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah			Nilai kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	1.03.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah							19.850.906		21.502.842		22.018.152		22.703.852		23.514.032		109.589.784		
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Balai Pengujian dan Peralatan	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Balai Jasa Konstruksi	
	1.03.01.001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah						337.103		292.278		292.278		292.278		292.278		1.506.215	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	
			Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Laporan	0	0	19	337.103	19	292.278	19	292.278	19	292.278	19	292.278	19	1.506.215			
	1.03.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						104.000		104.000		108.160		112.486		116.985		545.631	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; CILACAP	
			Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	104.000	12	104.000	12	108.160	12	112.486	12	116.985	12	545.631			
	1.03.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						45.960		48.060		49.982		51.981		54.060		250.043	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	
			Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	0	12	12	45.960	12	48.060	12	49.982	12	51.981	12	54.060	12	250.043			
	1.03.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						68.000		66.556		69.218		71.986		74.865		350.625	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO	
			Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	68.000	12	66.556	12	69.218	12	71.986	12	74.865	12	350.625			
	1.03.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						85.800		82.045		85.326		88.739		92.288		434.198	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL	
			Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	85.800	12	82.045	12	85.326	12	88.739	12	92.288	12	434.198			
	1.03.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						92.000		95.680		99.507		103.487		107.626		498.300	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SRAGEN; BLORA; GROBOGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	92.000	12	95.680	12	99.507	12	103.487	12	107.626	12	498.300		
		1.03.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						64.850		65.000		67.600		70.304		73.116		340.870	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PURWOREJO; KOTA MAGELANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	64.850	12	65.000	12	67.600	12	70.304	12	73.116	12	340.870		
		1.03.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						73.000		68.642		71.387		74.242		77.211		364.482	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	73.000	12	68.642	12	71.387	12	74.242	12	77.211	12	364.482		
		1.03.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						77.500		69.723		72.511		75.411		78.427		373.572	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI; KUDUS
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	77.500	12	69.723	12	72.511	12	75.411	12	78.427	12	373.572		
		1.03.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						85.000		66.400		69.056		71.818		74.690		366.964	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	85.000	12	66.400	12	69.056	12	71.818	12	74.690	12	366.964		
		1.03.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						90.900		99.990		103.989		108.148		112.473		515.500	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	90.900	12	99.990	12	103.989	12	108.148	12	112.473	12	515.500		
		1.03.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						47.000		35.000		36.400		37.856		39.370		195.626	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	0	12	12	47.000	12	35.000	12	36.400	12	37.856	12	39.370	12	195.626		
		1.03.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						213.500		224.000		232.960		242.278		251.969		1.164.707	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	213.500	12	224.000	12	232.960	12	242.278	12	251.969	12	1.164.707		
		1.03.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						94.500		91.500		100.650		110.715		121.786		519.151	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	94.500	12	91.500	12	100.650	12	110.715	12	121.786	12	519.151		
		1.03.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						71.500		70.000		77.000		84.700		93.170		396.370	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; GROBOGAN; SRAGEN; BLORA
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	71.500	12	70.000	12	77.000	12	84.700	12	93.170	12	396.370		
		1.03.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						110.000		105.000		115.500		127.050		139.755		597.305	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	110.000	12	105.000	12	115.500	12	127.050	12	139.755	12	597.305		
		1.03.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						93.600		70.000		77.000		84.700		93.170		418.470	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	0	12	12	93.600	12	70.000	12	77.000	12	84.700	12	93.170	12	418.470		
		1.03.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						73.200		73.200		80.520		88.572		97.429		412.921	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA MAGELANG; PURWOREJO
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	73.200	12	73.200	12	80.520	12	88.572	12	97.429	12	412.921		
		1.03.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						690.000		665.000		731.500		804.650		885.115		3.776.265	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	690.000	12	665.000	12	731.500	12	804.650	12	885.115	12	3.776.265		
		1.03.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						50.000		50.200		55.220		60.742		66.816		282.978	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	50.000	12	50.200	12	55.220	12	60.742	12	66.816	12	282.978		
		1.03.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						78.000		73.000		80.300		88.330		97.163		416.793	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	78.000	12	73.000	12	80.300	12	88.330	12	97.163	12	416.793		
		1.03.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						89.000		88.680		97.548		107.302		118.032		500.562	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	89.000	12	88.680	12	97.548	12	107.302	12	118.032	12	500.562		
		1.03.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						86.000		69.000		75.900		83.490		91.839		406.229	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI; KUDUS
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	86.000	12	69.000	12	75.900	12	83.490	12	91.839	12	406.229		
		1.03.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						70.000		79.000		86.900		95.590		105.149		436.639	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	70.000	12	79.000	12	86.900	12	95.590	12	105.149	12	436.639		
		1.03.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						132.000		154.000		169.400		186.340		204.974		846.714	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	0	12	12	132.000	12	154.000	12	169.400	12	186.340	12	204.974	12	846.714		
		1.03.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah						115.000		120.000		120.000		125.000		125.000		605.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	115.000	12	120.000	12	120.000	12	125.000	12	125.000	12	605.000		
		1.03.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						428.200		498.205		548.025		602.827		663.109		2.740.366	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	428.200	12	498.205	12	548.025	12	602.827	12	663.109	12	2.740.366		
		1.03.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						2.336.026		2.655.550		2.798.680		2.956.123		3.129.310		13.875.689	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	2.336.026	12	2.655.550	12	2.798.680	12	2.956.123	12	3.129.310	12	13.875.689		
		1.03.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						189.900		208.870		229.757		252.732		278.005		1.159.264	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	189.900	12	208.870	12	229.757	12	252.732	12	278.005	12	1.159.264		
		1.03.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						258.800		284.280		312.708		343.978		378.375		1.578.141	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	258.800	12	284.280	12	312.708	12	343.978	12	378.375	12	1.578.141		
		1.03.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						442.250		485.475		534.022		587.424		646.166		2.695.337	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SRAGEN; BLORA; GROBOGAN
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	442.250	12	485.475	12	534.022	12	587.424	12	646.166		2.695.337		
		1.03.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						272.450		378.775		416.652		458.317		504.148		2.030.342	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	272.450	12	378.775	12	416.652	12	458.317	12	504.148	12	2.030.342		
		1.03.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						384.689		435.350		478.885		526.773		579.450		2.405.147	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI; KUDUS
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	384.689	12	435.350	12	478.885	12	526.773	12	579.450		2.405.147		
		1.03.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						230.200		257.565		283.321		311.653		342.818		1.425.557	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	230.200	12	257.565	12	283.321	12	311.653	12	342.818	12	1.425.557		
		1.03.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						271.800		307.466		338.212		372.033		409.236		1.698.747	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	271.800	12	307.466	12	338.212	12	372.033	12	409.236	12	1.698.747		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah					233.450		240.960		265.056		291.561		320.717		1.351.744	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	
			Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	233.450	12	240.960	12	265.056	12	291.561	12	320.717	12	1.351.744			
		1.03.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah					300.592		395.310		434.841		478.325		526.157		2.135.225	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA MAGELANG; PURWOREJO	
			Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	300.592	12	395.310	12	434.841	12	478.325	12	526.157	12	2.135.225			
		1.03.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah					415.100		405.880		446.468		491.114		540.225		2.298.787	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; CILACAP	
			Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	415.100	12	405.880	12	446.468	12	491.114	12	540.225	12	2.298.787			
		1.03.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah					100.000		100.000		104.000		108.160		112.486		524.646	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; CILACAP	
			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	100.000	12	100.000	12	104.000	12	108.160	12	112.486	12	524.646			
		1.03.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah					44.000		50.450		52.468		54.566		56.748		258.232	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; GROBOGAN; SRAGEN; BLORA	
			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	44.000	12	50.450	12	52.468	12	54.566	12	56.748	12	258.232			
		1.03.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah					35.000		42.740		44.449		46.226		48.075		216.490	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	
			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	0	12	12	35.000	12	42.740	12	44.449	12	46.226	12	48.075	12	216.490			
		1.03.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah					50.000		52.000		54.080		56.243		58.492		270.815	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	
			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	0	12	12	50.000	12	52.000	12	54.080	12	56.243	12	58.492	12	270.815			
		1.03.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah					50.000		60.000		62.400		64.896		67.491		304.787	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	
			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	50.000	12	60.000	12	62.400	12	64.896	12	67.491	12	304.787			
		1.03.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah					42.000		43.492		45.231		47.040		48.921		226.684	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	42.000	12	43.492	12	45.231	12	47.040	12	48.921	12	226.684		
		1.03.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						50.000		52.000		54.080		56.243		58.492		270.815	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI; KUDUS
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	50.000	12	52.000	12	54.080	12	56.243	12	58.492	12	270.815		
		1.03.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						50.000		52.000		54.080		56.243		58.492		270.815	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	50.000	12	52.000	12	54.080	12	56.243	12	58.492	12	270.815		
		1.03.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						50.000		55.000		57.200		59.488		61.867		283.555	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PURWOREJO; KOTA MAGELANG
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	50.000	12	55.000	12	57.200	12	59.488	12	61.867	12	283.555		
		1.03.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						55.000		60.000		62.400		64.896		67.491		309.787	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	55.000	12	60.000	12	62.400	12	64.896	12	67.491	12	309.787		
		1.03.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						50.000		56.400		58.656		61.000		63.442		289.498	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	50.000	12	56.400	12	58.656	12	61.000	12	63.442	12	289.498		
		1.03.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						800.000		900.000		936.000		973.440		1.012.377		4.621.817	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	800.000	12	900.000	12	936.000	12	973.440	12	1.012.377	12	4.621.817		
		1.03.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						32.500		33.750		35.100		36.504		37.964		175.818	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	32.500	12	33.750	12	35.100	12	36.504	12	37.964	12	175.818		
		1.03.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						238.500		250.000		260.000		270.400		281.216		1.300.116	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	238.500	12	250.000	12	260.000	12	270.400	12	281.216	12	1.300.116		
		1.03.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						29.700		27.000		28.080		29.203		30.371		144.354	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	29.700	12	27.000	12	28.080	12	29.203	12	30.371	12	144.354		
		1.03.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						26.000		27.500		28.600		29.744		30.933		142.777	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	26.000	12	27.500	12	28.600	12	29.744	12	30.933	12	142.777		
		1.03.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						33.750		35.100		36.504		37.964		39.482		182.800	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SRAGEN; GROBOGAN; BLORA
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	33.750	12	35.100	12	36.504	12	37.964	12	39.482	12	182.800		
		1.03.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						25.000		25.000		26.000		27.040		28.121		131.161	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PURWOREJO; KOTA MAGELANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	25.000	12	25.000	12	26.000	12	27.040	12	28.121	12	131.161		
		1.03.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						20.000		21.000		21.840		22.713		23.621		109.174	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	20.000	12	21.000	12	21.840	12	22.713	12	23.621	12	109.174		
		1.03.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						27.500		27.500		28.600		29.744		30.933		144.277	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI; KUDUS
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	27.500	12	27.500	12	28.600	12	29.744	12	30.933	12	144.277		
		1.03.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						35.000		36.400		37.856		39.370		40.944		189.570	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	35.000	12	36.400	12	37.856	12	39.370	12	40.944	12	189.570		
		1.03.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						20.000		20.800		21.632		22.497		23.396		108.325	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	0	12	12	20.000	12	20.800	12	21.632	12	22.497	12	23.396	12	108.325		
		1.03.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						11.400		11.400		11.856		12.330		12.823		59.809	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	0	12	12	11.400	12	11.400	12	11.856	12	12.330	12	12.823		59.809		
		1.03.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						30.500		30.500		31.720		32.988		34.307		160.015	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; CILACAP
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	30.500	12	30.500	12	31.720	12	32.988	12	34.307	12	160.015		
		1.03.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						2.820		2.935		3.052		3.174		3.300		15.281	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SRAGEN; BLORA; GROBOGAN
				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	2.820	12	2.935	12	3.052	12	3.174	12	3.300	12	15.281		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						2.820		3.200		3.328		3.461		3.599		16.408	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	2.820	12	3.200	12	3.328	12	3.461	12	3.599	12	16.408			
		1.03.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						2.820		3.360		3.494		3.633		3.778		17.085	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI; KUDUS
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	2.820	12	3.360	12	3.494	12	3.633	12	3.778	12	17.085			
		1.03.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						2.820		2.932		3.049		3.170		3.296		15.267	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	2.820	12	2.932	12	3.049	12	3.170	12	3.296	12	15.267			
		1.03.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						2.820		3.120		3.244		3.373		3.507		16.064	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	2.820	12	3.120	12	3.244	12	3.373	12	3.507	12	16.064			
		1.03.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						2.820		2.820		2.932		3.049		3.170		14.791	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	2.820	12	2.820	12	2.932	12	3.049	12	3.170	12	14.791			
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	2.820	12	2.820	12	2.932	12	3.049	12	3.170	12	14.791			
		1.03.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						2.820		2.820		2.932		3.049		3.170		14.791	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA MAGELANG; PURWOREJO
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	2.820	12	2.820	12	2.932	12	3.049	12	3.170	12	14.791			
		1.03.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						2.820		2.820		2.932		3.049		3.170		14.791	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; CILACAP
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	2.820	12	2.820	12	2.932	12	3.049	12	3.170	12	14.791			
		1.03.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						14.136		20.160		20.160		20.160		20.160		94.776	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	14.136	12	20.160	12	20.160	12	20.160	12	20.160	12	94.776			
		1.03.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						2.820		2.160		2.246		2.335		2.428		11.989	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	2.820	12	2.160	12	2.246	12	2.335	12	2.428	12	11.989			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						2.820		3.180		3.307		3.439		3.576		16.322	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	2.820	12	3.180	12	3.307	12	3.439	12	3.576	12	16.322			
		1.03.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						375.000		389.710		285.000		285.000		1.619.710	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN		
			Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	375.000	12	389.710	12	285.000	12	285.000	12	285.000	12	1.619.710			
		1.03.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						288.000		341.400		196.597		206.997		218.437		1.251.431	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI; KUDUS
			Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	288.000	12	341.400	12	196.597	12	206.997	12	218.437	12	1.251.431			
		1.03.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						510.000		588.490		407.766		356.725		310.842		2.173.823	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA
			Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	510.000	12	588.490	12	407.766	12	356.725	12	310.842	12	2.173.823			
		1.03.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						974.500		625.090		656.000		628.000		729.000		3.612.590	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
			Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	974.500	12	625.090	12	656.000	12	628.000	12	729.000	12	3.612.590			
		1.03.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						225.000		234.000		243.360		253.094		263.218		1.218.672	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	0	12	12	225.000	12	234.000	12	243.360	12	253.094	12	263.218	12	1.218.672		
		1.03.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						100.000		75.000		72.448		73.746		75.096		396.290	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	0	12	12	100.000	12	75.000	12	72.448	12	73.746	12	75.096	12	396.290		
		1.03.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						1.041.000		759.340		907.755		944.065		981.828		4.633.988	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; GROBOGAN; BLORA; SRAGEN
				Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	1.041.000	12	759.340	12	907.755	12	944.065	12	981.828	12	4.633.988		
		1.03.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						305.500		414.265		378.835		363.588		358.531		1.820.719	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; CILACAP
				Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	305.500	12	414.265	12	378.835	12	363.588	12	358.531	12	1.820.719		
		1.03.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						1.182.200		870.000		960.000		1.029.000		1.108.350		5.149.550	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	1.182.200	12	870.000	12	960.000	12	1.029.000	12	1.108.350	12	5.149.550		
		1.03.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						358.000		416.032		243.730		248.785		253.630		1.520.177	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	358.000	12	416.032	12	243.730	12	248.785	12	253.630	12	1.520.177		
		1.03.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						325.535		346.900		188.800		195.800		202.800		1.259.835	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
				Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	325.535	12	346.900	12	188.800	12	195.800	12	202.800	12	1.259.835		
		1.03.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						685.000		518.000		323.800		328.800		334.000		2.189.600	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PURWOREJO; KOTA MAGELANG
				Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	685.000	12	518.000	12	323.800	12	328.800	12	334.000	12	2.189.600		
		1.03.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						29.000		30.000		31.200		32.448		33.745		156.393	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PURWOREJO; KOTA MAGELANG
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	29.000	12	30.000	12	31.200	12	32.448	12	33.745	12	156.393		
		1.03.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						35.000		35.689		37.116		38.600		40.144		186.549	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; WONOSOBO
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	35.000	12	35.689	12	37.116	12	38.600	12	40.144	12	186.549		
		1.03.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						317.492		300.000		312.000		324.480		337.459		1.591.431	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	317.492	12	300.000	12	312.000	12	324.480	12	337.459	12	1.591.431		
		1.03.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						20.000		20.000		20.800		21.632		22.497		104.929	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	20.000	12	20.000	12	20.800	12	21.632	12	22.497	12	104.929		
		1.03.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						24.415		25.394		26.409		27.465		28.563		132.246	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	0	12	12	24.415	12	25.394	12	26.409	12	27.465	12	28.563	12	132.246		
		1.03.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						42.100		43.780		45.531		47.352		49.246		228.009	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; GROBOGAN; SRAGEN; BLORA
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	42.100	12	43.780	12	45.531	12	47.352	12	49.246	12	228.009		
		1.03.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						58.750		57.500		59.800		62.192		64.679		302.921	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; CILACAP
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	58.750	12	57.500	12	59.800	12	62.192	12	64.679	12	302.921		
		1.03.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						26.400		27.784		28.895		30.050		31.252		144.381	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	26.400	12	27.784	12	28.895	12	30.050	12	31.252	12	144.381		
		1.03.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						40.000		40.570		42.192		43.879		45.634		212.275	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI; KUDUS
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.570	12	42.192	12	43.879	12	45.634	12	212.275		
		1.03.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						31.500		32.650		33.956		35.314		36.726		170.146	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SURAKARTA
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	31.500	12	32.650	12	33.956	12	35.314	12	36.726	12	170.146		
		1.03.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						53.958		59.919		62.315		64.807		67.399		308.398	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada (2017/2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023						
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	0	12	12	53.958	12	59.919	12	62.315	12	64.807	12	67.399	12	308.398		
		1.03.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						28.750		30.000		31.200		32.448		33.745		156.143	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	28.750	12	30.000	12	31.200	12	32.448	12	33.745	12	156.143		
		1.03.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor						1.454.750		2.117.150		1.995.200		1.706.200		1.287.600		8.560.900	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Unit	0	0	197	1.454.750	443	2.117.150	508	1.995.200	333	1.706.200	345	1.287.600	1.826	8.560.900		
		1.03.01.013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						360.000		1.295.000		1.801.500		1.801.500		1.820.500		7.078.500	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Unit	0	42	17	360.000	8	1.295.000	9	1.801.500	9	1.801.500	19	1.820.500	104	7.078.500		
		1.03.01.015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal						50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		250.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Orang	0	0	15	50.000	15	50.000	15	50.000	15	50.000	15	50.000	75	250.000		
		1.03.01.016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah						60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		300.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	0	0	13	60.000	13	60.000	13	60.000	13	60.000	13	60.000	13	300.000		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah		Nilai SAKIP PD	%	63,74	77,17	77,67		78,27		78,97		79,77		80,77		80,77		
		1.03.02	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						485.000		435.000		460.000		460.000		460.000		2.300.000		
				Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.02.001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						250.000		200.000		210.000		210.000		210.000		1.080.000	SUBBAG PROGRAM	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	0	0	7	250.000	7	200.000	7	210.000	7	210.000	7	210.000	7	1.080.000		
		1.03.02.002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						235.000		235.000		250.000		250.000		250.000		1.220.000	SUBBAG PROGRAM	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
				Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	0	0	29	235.000	29	235.000	29	250.000	29	250.000	29	250.000	29	1.220.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja dibawah ini menunjukan bahwa kondisi awal tahun 2018 (kondisi jalan baik 88,92%; jembatan baik 83,61%) sebagai pijakan untuk mencapai kinerja pada akhir RPJMD tahun 2018 (kondisi jalan baik 89,60%; jembatan baik 85,80%) dengan perincian tahapan pencapaian tiap tahun terdapat pada Tabel 7.1

Tabel 7.1

**Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	77,46	77,59	37,91	39,16	41,12	42,43	44,24	44,24
2	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	88,92	89,6	90,2	90,8	91,5	92	92,5	92,5
3	Persentase akses aman air aman perkotaan	%	80,98	84,15	86,15	88,15	90,15	92,15	94,15	94,15
4	Persentase akses aman air aman perdesaan	%	72,8	74,55	76,3	78,05	79,8	81,55	83,3	83,3
5	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	9,14	10,15	11,17	12,18	13,2	14,21	15,23	15,23

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Laporan	0	0	19	19	19	19	19	19
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	0	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	0	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	0	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	0	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	0	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	0	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Unit	0	0	197	443	508	333	345	1826	
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Unit	0	42	17	8	9	9	19	104	
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Orang	0	0	15	15	15	15	15	75	
Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	0	0	13	13	13	13	13	13	
Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	0	0	100	100	100	100	100	100	
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	0	0	7	7	7	7	7	7	
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	0	0	29	29	29	29	29	29	
Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	0	0	35.65	36.48	38	38.76	40.13	40.13	
Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	0	0	40.18	41.84	44.24	46.11	48.35	48.35	
Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1	Km	0	13.78	7.5	8.95	15.7	16.8	19.5	68.45	
Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 1	m	0	317	300	100	60	0	0	360	

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (DAK)	Km	0	0	8.7	0	0	0	0	8.7
Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 2	Km	0	10.46	10.67	15.9	13.65	7.7	10.29	58.21
Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 2	m	0	0	100	0	100	120	0	320
Panjang Pembangunan Jalan di Wilayah Barat 2	Km	0	0	0	0	4.7	0	0	4.7
Panjang Pembangunan Jalan (Perlindasan Tidak Sebidang)	Km	0	0	0	0	0	0.6	0	0.6
Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Timur 1	Km	0	8.1	15.52	7.75	9.22	5.76	4.55	42.8
Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 1	m	0	0	0	139.8	155.8	91	249.3	635.9
Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah timur 2	Km	0	11	9.5	9.45	25.67	16.43	21.4	82.45
Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 2	m	0	115	0	37.2	87.9	79.1	155.3	359.5
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	%	0	0	87.12	87.23	87.72	88.08	88.43	88.43
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	0	0	83.37	84.05	84.96	85.41	86.09	86.09
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	0	0	94.89	95.04	95.7	96.18	96.65	96.65
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	0	0	84.74	85.67	86.9	87.52	88.44	88.44
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	0	0	90.7	90.79	91.18	91.47	91.75	91.75
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%	0	0	80.86	81.55	82.46	82.91	83.6	83.6
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	0	0	96.33	96.46	97.05	97.47	97.89	97.89
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	0	0	82.78	83.45	84.34	84.79	85.46	85.46
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	%	0	0	90.74	91.45	92.41	92.88	93.6	93.6
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	0	0	90.65	90.8	91.46	91.93	92.4	92.4
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	0	0	96.12	96.27	96.93	97.4	97.87	97.87
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	0	0	91.73	92.51	93.55	94.07	94.85	94.85
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	0	0	86.45	86.61	87.32	87.83	88.33	88.33
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	0	0	90.13	91.04	92.25	92.86	93.77	93.77
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	0	0	81.71	81.94	82.96	83.69	84.41	84.41
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	0	0	86.34	87.54	89.14	89.93	91.13	91.13
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%	0	0	91.75	92.01	93.13	93.93	94.73	94.73
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%	0	0	89.91	91.45	93.49	94.52	96.05	96.05
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 1	Km	0	127.49	128.64	127.93	121.65	118.79	116.86	116.86
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 1	m	0	1102.6	1201.7	1194.6	1199.8	1196.5	1201.4	1201.4
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Semarang 1	Km	0	9.59	4.04	2	1.23	4.35	5.28	16.9
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Semarang 1	m	0	102.2	3.1	10.2	5	8.3	3.4	30
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Semarang 1	Km	0	0	0	0	0	0	0	0
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 2	Km	0	86.48	86.48	84.04	83.41	80.88	81.27	81.27
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 2	m	0	764.5	764.5	768.9	763	767	762	762
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Semarang 2	m	0	32.9	7.5	3.1	9	5	10	34.6
Rehabilitasi Jalan di Wilayah Semarang 2	Km	0	0	0	2.7	0	2.9	2	7.6
Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Semarang 2	Km	0	0	0	0.21	0.06	0	0.03	0.3

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Semarang 2	Km	0	0	0	0.53	0.31	0	0.48	1.32	
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 1	Km	0	140.8	138.35	136.8	137.38	137.08	140.08	140.08	
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 1	m	0	1191.2	1241.3	1241.8	1232.8	1223.4	1238.2	1238.2	
Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pati1	Km	0	3	1.95	1.3	0.8	1.25	1.5	6.8	
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pati 1	Km	0	1.5	3	3.5	3.65	4.5	1.75	16.4	
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pati 1	m	0	52	4.5	4	13	21.6	7.6	50.7	
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pati 1	Km	0	0	0	1.7	3	2	1.5	8.2	
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 2	Km	0	119.4	115.9	118.05	122.42	120.62	121.52	121.52	
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 2	m	0	1416.12	1320.12	1440.62	1440.62	1432.97	1429.72	1429.72	
Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pati 2	Km	0	0	1	0.5	0.15	0.25	0.2	2.1	
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pati 2	Km	0	0	1.25	2.95	1.8	3.51	3.15	12.66	
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pati 2	m	0	13	125	4.5	14.7	12.15	15.4	301.6	
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pati 2	Km	0	2.7	0.7	1.6	1.7	1.2	0.7	5.9	
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 1	Km	0	181.18	185.73	176.56	187.62	187.51	188.69	188.69	
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 1	m	0	1906.64	1935.64	1924.74	1878.54	1892.54	1930.44	1930.44	
Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 1	Km	0	5.2	0.6	0.62	1.34	0.46	0.63	3.65	
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Purwodadi 1	Km	0	1.9	0	0	0	1.37	0	1.37	
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Purwodadi 1	m	0	51.4	20.4	11.4	17.9	63.5	25.6	138.8	
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 2	Km	0	192.01	191.49	194.61	194.7	197.03	197.52	197.52	
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 2	m	0	1508.7	1584	1469.5	1560.6	1545.9	1536.8	1536.8	
Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 2	Km	0	1.5	0	0.15	0	0.88	0.94	1.97	
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Purwodadi 2	m	0	81.9	0	6	23.4	38.1	47.2	114.7	
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Purwodadi 2	Km	0	0	3	2	0	0	0	5	
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Purwodadi 2	Km	0	1.15	0	0	4.06	0.93	0.3	5.29	
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 1	Km	0	102.67	112.88	112.61	110.52	114.48	114.18	114.18	
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 1	m	0	757.65	750.25	651.55	757.65	750.35	757.65	757.65	
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Magelang 1	Km	0	0	7.1	5	6.57	0	1.8	13.37	
Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Magelang 1	Km	0	0	0.84	0.59	0.59	1.2	0.2	3.42	
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Magelang 1	Km	0	10	0	1	1	3	2.5	7.5	
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Magelang 1	m	0	40.5	7.4	7.6	0	7.3	0	20.8	
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 2	Km	0	128.08	153.35	164.85	168.18	163.8	165.2	165.2	
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 2	m	0	1353.83	1345.73	1353.83	1353.83	1353.83	1353.83	1353.83	
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Magelang 2	Km	0	0	4	4.7	0	0	0	8.7	
Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Magelang 2	Km	0	0	0.3	0.3	0.67	7.05	0.6	8.92	
Panjang Rehabilitasi Saluan Drainase di Wilayah Magelang 2	Km	0	3.28	1.5	1	2	0	5.05	9.35	
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Magelang 2	m	0	12	8.1	0	0	4	0	8.1	
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 1	Km	0	136.9	137.69	137.34	160.26	160.46	160.66	160.66	
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 1	m	0	1370.8	1408.5	1397.1	1416.3	1420.1	1412.2	1412.2	
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Wonosobo 1	Km	0	0	0	2	2.5	2.5	2.5	9.5	

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Wonosobo 1	Km	0	0.04	0.1	0.1	0.1	0.2	0	0.5
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Wonosobo 1	Km	0	3	2.9	0	1.3	1	1	6.2
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Wonosobo 1	m	0	60.3	20.6	32	12.8	9	16.9	91.3
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2	Km	0	103.76	109.01	102.7	83.34	83.19	84.84	84.84
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	m	0	845.2	860.2	871.6	843.2	867.1	839.5	839.5
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Wonosobo 2	Km	0	0	0	4	3	2	1	10
Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Wonosobo 2	Km	0	0	0.15	0.16	0.1	0.05	0.1	0.56
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Wonosobo 2	Km	0	7.4	0	1.5	1.5	2.7	2	7.7
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	m	0	30.5	21.5	4.1	32.5	8.6	36.2	102.9
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	Km	0	188.53	191.04	182.11	188.99	189.34	189.49	940.8
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	m	0	1190.3	1277.9	1120.2	1313.3	1304.5	1288.5	6304.4
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Surakarta 1	Km	0	0	0	3.2	2.9	2	1.7	9.8
Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Surakarta 1	Km	0	0	0	0.15	0.15	0.5	0.5	1.3
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Surakarta 1	Km	0	0	0	0.28	0.15	0.2	0.35	0.98
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Surakarta 1	m	0	37.9	47.7	49	8.3	17.1	33.1	155.2
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	Km	0	231.09	230.09	229.44	232.26	233.8	232.84	1158.43
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2	m	0	3166.9	3091	3197.2	3207.7	3178.2	3199.2	15885.4
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Surakarta 2	Km	0	0	2.5	2.65	3.1	2.2	2.5	12.95
Panjang Rehabilitasi DPT di Wilayah Surakarta 2	Km	0	0	0	0	0.03	0.04	0.3	0.37
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Surakarta 2	Km	0	0	0	0.5	1.2	0.55	0.95	3.2
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Surakarta 2	m	0	62.4	124.8	18.6	8.1	16.6	25.5	190.6
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 1	Km	0	0	72.45	71.62	73.45	72.97	73.46	73.46
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 1	m	0	0	842.9	842.9	842.9	842.9	842.9	842.9
Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Cilacap 1	Km	0	0.07	1.14	0.87	0.45	0	0	2.46
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Cilacap 1	m	0	0	8	0	0	0	0	8
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Cilacap 1	Km	0	0.01	0	0	2	3.08	2	7.08
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Cilacap 1	m	0	0	0	0.7	0.7	0.55	0.64	2.59
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 2	Km	0	0	72.56	69.3	71.78	69.98	70.98	70.98
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 2	m	0	0	1120.2	1151	1167.1	1166.7	1164.9	1164.9
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Cilacap 2	m	0	5.8	61.5	27.7	10.6	11	12.8	123.6
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Cilacap 2	Km	0	4.04	0	0.5	2	4	3	9.5
Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Cilacap 2	Km	0	0	0	0.75	0.2	0	0	0.95
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Cilacap 2	Km	0	0	0	1.2	0	0	0	1.2
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 1	Km	0	0	78.92	81.55	83.52	84.82	83.62	83.62
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 1	m	0	0	759.4	759.4	765.4	765.4	765.4	765.4
Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 1	Km	0	0	0.55	0.8	0.6	0.4	0.6	2.95
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Tegal 1	Km	0	0	4	1.4	2.6	1	1.5	10.5
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Tegal 1	m	0	0	6	6	0	0	5	17
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Tegal 1	Km	0	0	0.5	1.35	1.25	1.75	2	6.85
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 2	Km	0	0	94.72	92.82	97.22	96.72	95.62	95.62

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 2	m	0	0	1249.8	1242.8	1243.1	1249.8	1244.8	1244.8
Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 2	Km	0	0	0.5	0.5	0	0	0.6	1.6
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Tegal 2	Km	0	0	4.5	1	2.5	3	1.5	12.5
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Tegal 2	m	0	0	0	7	6.7	2	5	20.7
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Tegal 2	Km	0	0	0.5	1.9	0	0	2	4.4
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 1	Km	0	0	154.28	152.76	156.86	156.37	157.67	157.67
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 1	m	0	0	1570.75	1623.25	1621.25	1620.95	1617.95	1617.95
Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pekalongan 1	Km	0	0	1.12	0	0	0	0	1.12
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pekalongan 1	Km	0	0	0	2.74	3.04	3.53	2.23	11.54
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pekalongan 1	m	0	0	24.7	15.2	17.2	17.5	20.5	95.1
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pekalongan 1	Km	0	0	0	0	0	0	0	0
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2	Km	0	0	90.02	88.82	88.07	88.07	87.52	87.52
Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	m	0	0	809.9	1054.1	1093.6	1079.7	1063.3	1063.3
Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pekalongan 2	Km	0	0	1.5	2.5	1.5	1.65	1.8	8.95
Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	m	0	0	28.2	44	4.5	18.4	34.8	133.9
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pekalongan 2	Km	0	0	1.15	0.4	0.7	0.8	0.85	3.9
Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pekalongan 2	Km	0	0	0	1	2.4	2.15	2.5	8.05
Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan	%	88.28	89.84	93.05	94.62	95.33	97.68	100	100
Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	0	62.5	69.99	77.5	85	92.5	100	100
Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara	Unit	0	51	27	24	24	24	24	24
Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah	Unit	0	118	98	73	12	109	93	385
Jumlah bronjong	Buah	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	20000
Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu	Orang	0	150	100	100	100	100	100	500
Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi	Buah	0	1080	750	750	750	750	750	3750
Jumlah unit Pemeliharaan alat uji	Unit	0	77	77	80	84	87	91	91
Jumlah unit Penambahan alat uji	Unit	0	3	3	4	2	3	3	13
Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001	Dokumen	0	2	2	2	2	2	2	10
Persentase panjang jalan yang dileger	%	89.8	89.84	96.3	97.05	98.43	99.02	100	100
Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan	%	0	0	100	100	100	100	100	100
Data Kondisi Jalan	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1
Data Kondisi Jembatan	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah perhitungan LHR	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1
Panjang Jalan yang dileger	Km	0	124.85	40.89	17.98	33.18	14.29	29.19	135.53
Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	Dokumen	0	8	12	6	10	4	2	34
Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan	Dokumen	0	11	11	12	11	12	11	11
Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	Kegiatan	0	0	1	1	1	1	1	1
Luas lahan jalan dan jembatan yang dibebaskan	m2	0	0	8222	14000	4751	5539	3900	36412
Persentase akses air minum perkotaan	%	80.98	84.15	86.15	88.15	90.15	92.15	94.15	94.15
Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%	80	81.5	83.5	85.5	87.5	89.5	91.5	91.5
Persentase akses air minum perdesaan	%	72.8	74.55	76.3	78.05	79.8	81.55	83.3	83.3
Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun	Dokumen	0	0	1	1	2	2	1	7

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah SPAM Regional	Unit	0	0	1	2	3	2	2	3
Jumlah kabupaten/kota terfasilitasi Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat Pamsimas III	Kabupaten/Kota	0	0	29	29	29	29	29	29
Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pengembangan teknis, kelembagaan, administrasi sarana prasarana air Limbah domestik Kab./Kota (IPLT & IPAL skala permukiman)	Kabupaten/Kota	0	0	8	8	8	8	8	40
Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	9.14	10.15	11.17	12.18	13.2	14.21	15.23	15.23
Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	5.43	7.7	9.71	11.86	14.13	16.54	19.09	19.09
Jumlah bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	Kabupaten/Kota	0	16	16	16	16	16	16	16
Jumlah bangunan gedung milik daerah yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah kegiatan bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah Pendataan teknis BGMD Prov Jateng	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung bagi SKPD Teknis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Kegiatan	0	0	1	1	1	1	1	1
Belanja Hibah Konstruksi, Tahap 1 , UKL/UPL, DED, konstruksi dan Pengawasan konstruksi (Gedung Kejati Jawa Tengah)	Kegiatan	0	0	1	1	0	0	0	0
Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk pengguna jasa	Orang	0	0	0	60	80	80	80	80
Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa	Orang	0	0	0	60	80	80	80	80
Rakor TPJK Kab./Kota	Orang	0	0	0	100	120	120	120	120
Forum Jasa Konstruksi daerah	Orang	0	0	0	100	100	100	100	100
Focus Group Discussion	Orang	0	0	0	100	160	120	160	160
Pembangunan Masjid Agung Magelang	Unit	0	0	0	1	1	1	1	1
Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	Orang	0	0	200	160	160	160	160	840
Jumlah penerbitan HSPK	Dokumen	0	0	3	2	2	2	2	11

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah dan target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah lima tahun ke depan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

Dokumen ini memiliki jangka waktu Tahun 2018-2023 sesuai dengan masa kerja Gubernur-Wakil Gubernur dan sesuai pula dengan jangka waktu RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja tahunan, dan pada saat masa transisi yaitu pada tahun 2019 dokumen Renstra ini dapat dipergunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJP-D dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM Nasional maupun dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun terjadi perubahan atas kondisi lingkungan strategis , maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi jaringan jalan dan prasarana sarana pemukiman serta bangunan gedung yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, perekat antar daerah/wilayah perbatasan provinsi, menumbuh kembangkan kegiatan pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah serta perluasan akses pelayanan sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung Daya Saing Jawa Tengah.

Demikian penyusunan dokumen ini semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin.